

Kelalaian Jiwasraya

Hal 6

Pemanfaatan Dana Otsus  
Belum Optimal

Hal 39

BPK Minta Kemnaker  
Tindaklanjuti Temuan Pemeriksaan

Hal 46



# Jiwasraya Rugikan Negara Rp16,81 Triliun

BPK Perkuat  
Pemeriksaan  
LKPD



**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II 2019 yang terdiri atas 1 LHP keuangan (1 persen), 267 LHP kinerja (54 persen), dan 220 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (45 persen).

IHPS II 2019 menjadi laporan utama dalam *Warta Pemeriksa* edisi Maret 2020. Salah satu hasil pemeriksaan yang signifikan yakni pemeriksaan kinerja atas efektivitas program pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua tahun 2018 hingga semester I tahun 2019. Pemeriksaan itu dilaksanakan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), KemenPANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, program pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua tidak efektif. Hal itu disebabkan tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku.

Tata kelola yang tidak baik juga menjadi perhatian BPK pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sebelum mencuatnya kasus gagal bayar dan terkuaknya dugaan korupsi di Jiwasraya, BPK sejak lama sudah menemukan adanya ketidakberesan dalam tubuh perusahaan asuransi jiwa tertua di Tanah Air tersebut. Ketidakberesan itu



terungkap dalam sejumlah pemeriksaan yang telah dilakukan sejak beberapa tahun silam, mulai dari pemeriksaan laporan keuangan hingga pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Hasil Penghitungan Kerugian Negara Jiwasraya diselesaikan pada awal Maret 2020 dan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI dan diumumkan kepada publik pada Senin, 9 Maret 2020. Berdasarkan perhitungan BPK, kerugian negara dalam kasus Jiwasraya sebesar Rp16,81 triliun. Metode yang digunakan adalah *total loss*. Jadi seluruh saham yang diduga dibeli secara melawan hukum dianggap berdampak terhadap kerugian negara.

Laporan redaksi juga memuat mengenai perbaikan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam beberapa tahun terakhir. Seperti dicantumkan dalam IHPS I 2019, BPK telah memeriksa 542 LKPD Tahun 2018. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 443 LKPD atau 82 persen dari keseluruhan LKPD. Angka itu melonjak dari tingkat opini WTP LKPD pada 2014 yang sebesar 47 persen. ■

## TIM EDITORIAL

### Pengarah

Agung Firman Sampurna  
Agus Joko Pramono  
Bahrullah Akbar  
Bahtiar Arif

### Penanggung Jawab

Selvia Vivi Devianti

### Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

### Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

### Sekretariat

Bestantia Indraswati  
Klara Ransingin  
Ridha Sukma  
Sigit Rais  
Sudarman

### Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI  
Jalan Gatot Subroto no 31  
Jakarta  
Telepon: 021-25549000  
Pesawat 1188/1187  
Faksimili: 021-57854096  
Email: wartabpkri@gmail.com  
www.bpk.go.id

### Diterbitkan oleh

Sekretariat Jenderal  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

## JIWASRAYA RUGIKAN NEGARA RP16,81 TRILIUN

- 4** BPK berkomitmen berkolaborasi penuh dan mendukung pekerjaan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi adanya niat jahat dalam kasus Jiwasraya.

## 10 PERBAIKI PROGRAM PENSIUN

## 14 BPK PERKUAT PEMERIKSAAN LKPD

## PEMERIKSAAN KELAYAKAN INVESTASI DARI HULU KE HILIR

- 18** BPK melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi tata kelola keuangan serta investasi agar BUMN tidak merugi, terutama dari kemungkinan investasi berisiko.

## 20 BPK TAMPILKAN APLIKASI IDANCE DI PRAHA

## 22 BPK AKTIF DALAM PERTEMUAN VIRTUAL ANGGOTA KOMITE PENGARAH INTOSAI WGEA

## 23 DANIEL LUMBAN TOBING, ANGGOTA VII BPK RI/ PIMPINAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VII BPK RI "MENJAGA ARAH BUMN"

## 28 TETAP BEKERJA DI TENGAH PANDEMI KORONA

## 34 MELANJUTKAN INSTING BISNIS SUVENIR

## MENGATASI MASALAH DENGAN SELF HEALING

- 37** Masalah yang disampaikan klien kepada psikolog juga terjaga kerahasiaannya.

## 39 PEMANFAATAN DANA OTSUS BELUM OPTIMAL

## KELALAIAN JIWASRAYA

- 6** Jiwasraya menjadi pemegang saham terbanyak di salah satu perusahaan swasta dengan nilai Rp6,04 triliun. Padahal, total aset perusahaan tersebut hanya sebesar Rp332 miliar dan selalu mengalami kerugian.



## IPKN TINGKATKAN KAPASITAS PROFESI PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA

- 42** IPKN ingin meningkatkan pemahaman akuntabilitas tidak hanya dari sisi pemeriksaan, tapi juga dari sisi pengelolaan tanggung jawab keuangan negara.

## 44 'REVALUASI ASET JADI CATATAN YANG PERLU DIPERHATIKAN'

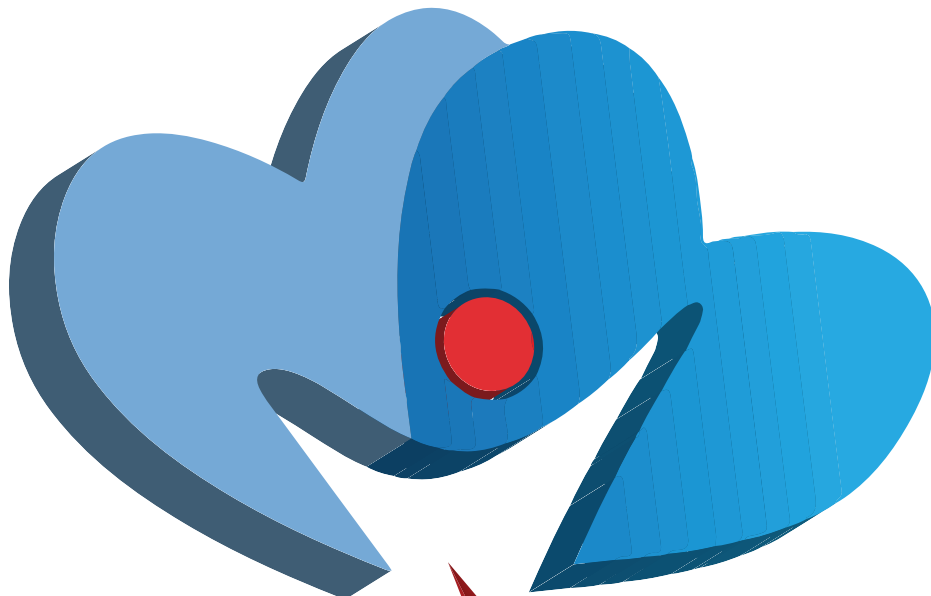
## BPK MINTA KEMNAKER TINDAK LANJUTI TEMUAN PEMERIKSAAN

- 46** Temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti dapat disampaikan kepada BPK untuk ditetapkan sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

## 47 TAHUKAH ANDA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI BPK?

## 50 BERITA FOTO

# Jiwasraya Rugikan Negara Rp16,81 Triliun



BPK berkomitmen berkolaborasi penuh dan mendukung pekerjaan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi adanya niat jahat dalam kasus Jiwasraya.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menepati komitmennya untuk menyelesaikan penghitungan kerugian negara dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada awal Maret 2020. Laporan juga telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI dan diumumkan kepada publik pada Senin, 9 Maret 2020.

Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2008-2018 dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan Kejaksaan Agung pada 30 Desember 2019.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung menyampaikan,

## KERUGIAN NEGARA DI JIWASRAYA

KERUGIAN NEGARA  
AKIBAT INVESTASI  
SAHAM  
**RP4,65 TRILIUN**

KERUGIAN NEGARA  
AKIBAT INVESTASI  
REKSA DANA  
**RP12,16 TRILIUN**

**TOTAL  
KERUGIAN NEGARA  
RP16,81 TRILIUN**

berdasarkan perhitungan BPK, kerugian negara dalam kasus Jiwasraya sebesar Rp16,81 triliun.

“Metode yang kami gunakan dalam PKN adalah *total loss* di mana seluruh saham-saham yang diduga dibeli secara melawan hukum, dianggap berdampak dan nilai kerugian negara adalah sebesar Rp16,81 triliun,” kata Agung.

Kerugian negara tersebut terdiri atas kerugian dari investasi saham sebesar Rp4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksa dana sebesar Rp12,16 triliun.

Agung menjelaskan, terdapat dua pemeriksaan yang dilakukan BPK terkait dengan kasus di tubuh Jiwasraya. Pertama, yakni pemeriksaan investigasi yang saat ini masih berjalan dengan waktu tidak dibatasi. Menurut Agung, pemeriksaan tersebut bisa memakan waktu sekitar satu tahun.

Kedua, yakni pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian negara untuk mendukung proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kejaksaan.

“Tugas BPK adalah melakukan identifikasi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan yang menimbulkan kerugian negara,” kata Agung.

Namun, untuk menentukan apakah dalam pelanggaran ketentuan perundang-undangan tersebut ada niat jahat atau *mens rea*, sepenuhnya merupakan wewenang aparat penegak hukum.

Agung menyampaikan, rentang waktu penghitungan kerugian negara dilakukan sejak 2008 hingga 2018 berkaitan dengan produk JS Saving Plan milik Jiwasraya. Menurut Agung, meski produk itu sudah ada sejak 2008, peningkatan intensitas masalah terjadi mulai 2014.

“Jadi mereka ada *insolvency*, kemudian mereka melakukan kebijakan investasi. Terkait investasi itu yang kita lakukan pendalamannya,” ujar Agung.

Selain pemeriksaan investigasi ini, BPK juga pernah melaksanakan peme-



Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, dan Jaksa Agung, ST Burhanuddin memberikan keterangan terkait kasus Jiwasraya.

riksaan dengan tujuan tertentu, kinerja, dan laporan keuangan terhadap Jiwasraya.

Agung menegaskan, BPK berkomitmen untuk berkolaborasi penuh dan mendukung pekerjaan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi adanya niat jahat dalam kasus Jiwasraya.

Saat ini, Agung menambahkan, proses audit investigasi juga masih berjalan. Agung menyebut, pihak yang terlibat dalam kasus ini skalanya besar. “Apa yang sudah didapatkan, kita lakukan validasi lagi. Kemudian kita lakukan pengujian lagi,” kata Agung.

BPK pun berencana melaporkan pemeriksaan investigasi tersebut secara berseri dan sepenuhnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Agung berharap informasi dari BPK dapat memberikan ruang baru bagi penegak hukum untuk mengembangkan kasus tersebut.

“Kita punya komitmen yang kuat untuk terus menuntaskan kasus ini,” tegas Agung.

Di tempat yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan hasil penghitungan kerugian negara atas kasus Jiwasraya oleh BPK melengkapi proses pelimpahan berkas perkara. “Jadi dalam pemberkasan ini kita memerlukan kerugian negara.”

Burhanuddin pun menegaskan, Kejaksaan Agung akan terus mengembangkan penyidikan dan mengejar seluruh pihak yang terlibat dalam kasus Jiwasraya. ●

”

**Tugas BPK adalah melakukan identifikasi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan yang menimbulkan kerugian negara.**

# Kelalaian Jiwasraya

Jiwasraya menjadi pemegang saham terbanyak di salah satu perusahaan swasta dengan nilai Rp6,04 triliun. Padahal, total aset perusahaan tersebut hanya sebesar Rp332 miliar dan selalu mengalami kerugian.

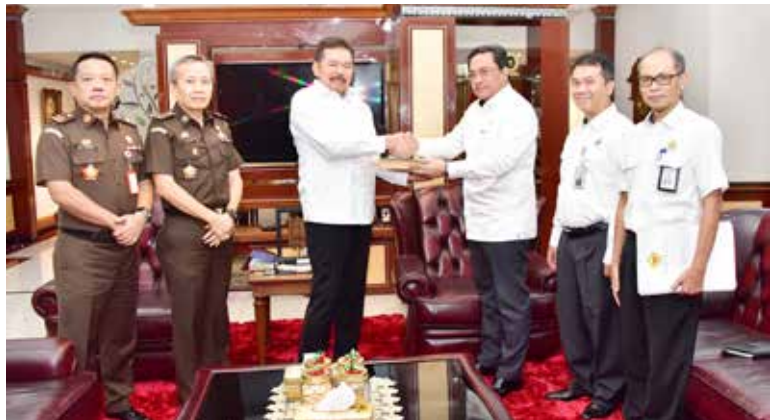
**S**ebelum mencuatnya kasus gagal bayar dan terkuaknya dugaan korupsi di Jiwasraya, Badan Pemeriksa Keuangan sejak lama sudah menemukan adanya ketidakberesan dalam tubuh perusahaan asuransi jiwa tertua di Tanah Air tersebut. Ketidakberesan itu terungkap dalam sejumlah pemeriksaan yang telah dilakukan sejak beberapa tahun silam, mulai dari pemeriksaan laporan keuangan hingga pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Pada 2016, misalnya, BPK melakukan PDTT atas Pengelolaan Bisnis Asuransi, Investasi, Pendapatan, dan Biaya Operasional Jiwasraya untuk tahun 2014-2015. Entitas yang diperiksa bukan hanya Jiwasraya, tapi juga instansi terkait lainnya.

PDTT itu dilakukan untuk menindaklanjuti pemeriksaan atas laporan keuangan Jiwasraya per 31 Desember 2007. Saat itu, BPK memberikan opini tidak menyatakan pendapat atau *disclaimer*. Sementara dalam pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada tahun buku 2009-2010 (semester I), BPK menyimpulkan rancangan dan terapan SPI Jiwasraya tidak sesuai dengan praktik *good corporate governance* pada badan usaha milik negara (BUMN).

Adapun dalam PDTT yang dilakukan pada 24 Februari-31 Mei 2016, ada 16 poin temuan pemeriksaan atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan, dan biaya operasional. Temuan itu antara lain pertanggungjawaban penggunaan dana aktivitas pada beberapa kantor Jiwasraya sebesar Rp2,5 miliar belum tertib. Kemudian, pengelolaan dan pengawasan atas properti investasi tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, Jiwasraya tidak optimal dalam mengawasi reksadana yang dimiliki dan terdapat penempatan saham secara tidak langsung di satu perusahaan yang berkinerja kurang baik. Investasi dalam bentuk reksadana merupakan investasi dalam jumlah paling besar di Jiwasraya. Jumlahnya mencapai 44,64 persen dari total investasi sebanyak Rp21,7 triliun di tahun 2015 dan 44 persen



dari total investasi Rp16,9 triliun di tahun 2014.

Dengan proporsi tersebut, investasi dalam bentuk reksadana memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp302,2 miliar atau 33,09 persen dari total pendapatan 2015 sebesar Rp913,5 miliar dan sebesar Rp1,14 triliun atau 74,30 persen dari total pendapatan 2014 yang sebesar Rp1,54 triliun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Jiwasraya diketahui lalai dalam mengawasi transaksi reksadana-reksadana yang dimiliki. Hal itu mengakibatkan terdapatnya penempatan saham senilai Rp6,04 triliun di satu perusahaan.

Jiwasraya pada 2015 berinvestasi di 41 reksadana senilai Rp9,7 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 jenis reksadana bernilai Rp8,89 triliun atau 91,57 persen dari total investasi pada instrumen reksadana.

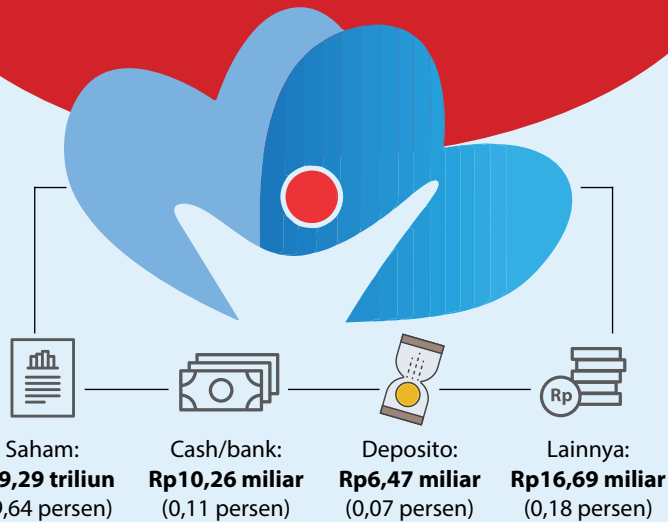
Sementara berdasarkan laporan keuangan *audited* 2015 masing-masing reksadana, diketahui bahwa 14 jenis reksadana tersebut memiliki total aset sebesar Rp9,32 triliun. Komposisi *underlying* investasi reksadana yang dimiliki Jiwasraya menunjukkan proporsi yang tidak berimbang. Sebab, mayoritas diinvestasikan dalam bentuk saham dengan persentase mendekati 100 persen, tepatnya 99,64 persen.

Kondisi tersebut mengakibatkan Jiwasraya menghadapi risiko yang cukup besar akibat fluktuasi harga saham di bursa.

## PENYERAHAN LHP

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Penghitungan Kerugian Negara PT Asuransi Jiwasraya kepada Jaksa Agung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan kerugian negara sebesar Rp16,81 triliun.

## KOMPOSISI KOMPONEN INVESTASI (*UNDERLYING*) REKSADANA JIWRASRAYA (2015)



**TOTAL: RP9,32 TRILIUN**

**Sumber:** LHP Pengelolaan Bisnis Asuransi, Investasi, Pendapatan dan Biaya Operasional Jiwasraya 2014-2015.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa *underlying* yang sebagian besar berupa saham tidak menunjukkan proporsi yang baik. Sebab, Jiwasraya hanya fokus pada saham-saham tertentu dari perusahaan yang kinerja dan likuiditasnya tidak begitu baik.

Hasil pemeriksaan BPK menemukan bahwa Jiwasraya secara tidak langsung menjadi peme-

gang saham terbanyak di salah satu perusahaan swasta, yaitu PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) sebesar Rp6,04 triliun. Padahal, total aset perusahaan tersebut hanya sebesar Rp332 miliar dan selalu mengalami kerugian.

Investasi pada satu saham dengan nilai sebesar itu sangat besar bagi Jiwasraya apabila terjadi penurunan harga saham IIKP. Apalagi, aset IIKP sebagian besar merupakan persediaan ikan indukan dengan nilai Rp182,7 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan *audited* IIKP, IIKP pada 2015 mengalami kerugian sebesar Rp16,3 miliar dan merugi Rp Rp11,9 miliar pada 2014. IIKP terakhir kali mencatatkan keuntungan pada 2008.

Saat itu, BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan pada 27 Juli 2016, telah menyatakan bahwa Jiwasraya berpotensi mengalami kerugian atas investasi yang tidak *prudent* yang dilakukan oleh para manajer investasi. Selain itu, Jiwasraya berpotensi mengalami kesulitan dalam melakukan *redemption* atas reksadana dengan *underlying* saham tidak likuid dan jumlah yang terlalu besar pada saham tertentu.

Kondisi tersebut terjadi karena direksi Jiwasraya kurang lazim dalam memilih manajer investasi sebagai pengelola dana. Kemudian, komite investasi lalai dalam melakukan pengawasan atas realisasi investasi untuk masing-masing reksadana. Selain itu, belum adanya SOP terperinci yang mengatur mekanisme pemilihan manajer investasi, pengelolaan dan pengawasan reksadana.

### Penjelasan Direksi Jiwasraya Terkait Investasi

- Seluruh proses transaksi atas pembelian dan penjualan efek reksadana telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan pedoman investasi yang dimiliki Jiwasraya.
- Pelaksanaan transaksi efek saham memenuhi SOP dan *compliance* yang ditetapkan pihak manajer investasi selaku pengelola dan bank kustodian selaku penyimpan harta reksadana.
- Jiwasraya akan lebih hati-hati dalam memilih manajer investasi.
- Akan memerinci SOP yang mengatur tentang mekanisme pemilihan manajer investasi.
- Akan meningkatkan pengawasan terhadap portofolio yang dikelola manajer investasi dan akan mengingatkan apabila dalam pengelolaan dana terdapat potensi yang dapat merugikan perusahaan.

### Rekomendasi BPK

- Menyusun ketentuan/SOP yang mengatur secara terperinci mengenai mekanisme pemilihan manajer investasi, pengelolaan, dan pengawasan reksadana.
- Meningkatkan peran komite investasi dalam pengawasan atas realisasi investasi.
- Meminta manajer investasi mengalihkan saham yang berkinerja kurang baik ke saham dan instrumen lainnya yang memiliki kinerja baik dari aspek keuangan, likuiditas, dan kapitalisasi besar.

## Masalah investasi properti

BPK dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terkait pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan, dan biaya operasional Jiwasraya, juga menemukan permasalahan terkait investasi properti. Hasil pemeriksaan menunjukkan, pengelolaan dan pengawasan atas properti investasi Jiwasraya tidak sesuai ketentuan.

Seperti diketahui, salah satu instrumen investasi yang diperbolehkan regulator sebagai sarana investasi perusahaan asuransi adalah properti investasi. Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau *lessee/penyewa* melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, namun tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif serta dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Jumlah properti investasi Jiwasraya di seluruh Indonesia sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebanyak 227 unit tanah dan bangunan dengan luas tanah 195.785 meter persegi dan luas bangunan 133.366 meter persegi senilai Rp4.63 triliun.

Kepemilikan Jiwasraya atas properti investasi tersebut sebagian besar dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang memiliki batas waktu tertentu, antara 20-30 tahun.

Hasil pemeriksaan dokumen dan cek fisik atas pengelolaan aset properti investasi ditemukan beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah sebanyak 16 properti investasi senilai Rp397 miliar, tidak terawat dan belum dimanfaatkan.

Sebagian besar aset tersebut berupa bangunan yang tidak terawat dan tidak berpenghuni (rumah tua) dan tanah kosong, namun sebagian besar aset tersebut terletak di area strategis yang dekat dengan jalan raya dan pusat kota.

Atas properti tersebut Jiwasraya telah mengeluarkan biaya pemeliharaan minimal sebesar Rp1,3 miliar. Dengan tidak terawat dan tidak terkelolanya properti investasi tersebut, Jiwasraya tidak dapat menyewakan dengan tarif yang optimal, sehingga belum dapat memberikan hasil berupa pendapatan sewa atas properti investasi yang ada dan mengeluarkan biaya pemeliharaan yang tidak jelas hasilnya.

Hasil Konfirmasi kepada pengelola aset properti investasi di kantor pusat, menyatakan bahwa bagian properti investasi Jiwasraya belum

pernah membuat *monitoring* atas kondisi fisik properti investasi yang seharusnya dilakukan secara periodik selama enam bulan sekali baik di pusat, wilayah maupun cabang.

Bagian properti investasi Kantor pusat Jiwasraya sebagai penanggungjawab atas pengelolaan properti investasi di seluruh Indonesia juga belum pernah membuat nota dinas untuk pengecekan fisik yang dikirimkan ke kanwil untuk ditindaklanjuti. Selain itu, bagian investasi properti dari kantor pusat belum pernah membuat kajian kelayakan atas properti-properti di cabang, wilayah dan Kantor Pusat, apakah perlu untuk renovasi atau tidak.

BPK juga menemukan bahwa sebanyak 41 properti investasi dikuasai pihak lain. Nilai properti investasi tersebut sedikitnya mencapai Rp316,3 miliar.

Sejumlah permasalahan properti investasi itu disebabkan karena direksi Jiwasraya dan jajarannya tidak melakukan upaya maksimal dalam menyelesaikan permasalahan administrasi/pengelolaan properti investasi, khususnya properti yang dikuasai pihak ketiga.

Jiwasraya juga belum memiliki rencana pemanfaatan dan mekanisme pengawasan atas properti investasi yang ada.

Terkait hal tersebut, direksi Jiwasraya kala itu telah memberikan beberapa penjelasan. Mengenai adanya 16 properti yang tidak terawat, direksi Jiwasraya saat itu menyatakan akan dianalisa untuk direncanakan pada RKAP 2017.

Sementara, terkait properti yang dikuasai pihak ketiga, dilakukan evaluasi dan kajian mengenai langkah/upaya litigasi ataupun nonlitigasi oleh tim perusahaan.

## Rekomendasi BPK

- a. Mengupayakan penyelesaian permasalahan properti investasi dengan berkordinasi kepada Kementerian BUMN dan pihak terkait.
- b. Melakukan upaya penyelesaian permasalahan administrasi/pengelolaan properti investasi, khususnya properti yang dikuasai pihak ketiga dan melaporkan perkembangannya ke BPK.
- c. Membuat rencana strategis dan target waktu atas pemanfaatan properti sehingga dapat memberikan pendapatan yang optimal bagi perusahaan.





Nilai pendapatan sewa tahun 2014 hanya 0,27 persen dan tahun 2015 hanya 0,29 persen dari nilai total aset properti investasi dan jauh dari target pendapatan sewa yang ditetapkan dalam RKAP sebesar 5 persen dari nilai asetnya.

### Kontribusi minim

Temuan BPK lainnya adalah pemanfaatan properti investasi tidak memberikan kontribusi pendapatan yang optimal. Properti investasi merupakan salah satu sumber pendapatan Jiwasraya. Pendapatan tersebut berupa pendapatan sewa yang diperoleh dengan cara menyewakan aset properti yang dimiliki perusahaan. Aset properti investasi sebagian besar berupa tanah dan bangunan serta pusat pertokoan yang disewakan secara bulanan dan tahunan.

Pendapatan sewa properti investasi tiap tahunnya yang paling besar berasal dari sewa lahan BOT dengan PT GMR (Pengelola Mall Cilandak Town Square, yaitu sebesar Rp3,8 miliar untuk tahun 2014 dan Rp4,05 miliar untuk tahun 2015.

Jiwasraya pada 2014 melaporkan pendapatan sewa sebesar Rp13 triliun. Sedangkan pada 2015 sebesar Rp15,2 triliun.

Nilai pendapatan sewa tahun 2014 hanya 0,27 persen dan tahun 2015 hanya 0,29 persen dari nilai total aset properti investasi dan jauh dari target pendapatan sewa yang ditetapkan dalam RKAP sebesar 5 persen dari nilai asetnya. Realisasi pendapatan sewa yang rendah tersebut disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan properti investasi dan banyaknya properti investasi yang disewakan apa adanya, sehingga tarif sewa yang didapatkan menjadi relatif sangat rendah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah Surabaya, Kantor Wilayah Bandung dan Kantor Wilayah Medan atas pengelolaan pendapatan sewa properti investasi, ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Antara lain, Sebanyak 551 properti senilai Rp1,34 triliun disewakan tanpa perikatan perjanjian.

Selain itu, pengelolaan penerimaan pendapatan sewa atas properti investasi belum optimal. Salah satu penyebabnya karena ada 471 penyewa menunggak membayar sewa.

Permasalahan lainnya adalah nilai sewa properti yang tidak wajar. Terkait hal ini, Jiwasraya belum memiliki pedoman dalam menentukan kewajaran tarif sewa properti investasi yang dimiliki.

Dengan tidak adanya pedoman tersebut, bagian properti investasi kesulitan dalam menentukan besaran tarif sewa secara wajar yang akan dikenakan ke penyewa. Tarif sewa yang selama ini dikenakan ke penyewa nilai sewanya

mengikuti nilai sewa tahun-tahun sebelumnya dan kenaikannya belum diperhitungkan dan disesuaikan dengan nilai NJOP. Padahal, mayoritas penyewa properti investasi telah menyewa dengan periode yang cukup lama (mulai tahun 1950-an) dengan tarif sewa yang sangat rendah.

Beragam permasalahan itu mengakibatkan Jiwasraya kehilangan potensi pendapatan terhadap aset properti yang dikelola tanpa perjanjian. Lalu, nilai piutang sewa pada neraca per 31 Desember 2015 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Direksi Jiwasraya saat itu menjelaskan, kontribusi pendapatan sektor properti masih sangat rendah dan jauh dari ekspektasi. Hal ini terjadi karena aset properti berupa rumah tinggal layak huni disewakan dengan kisaran harga 3-5 persen dari NJOP. Nilai tersebut relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai aset dan masih besarnya portofolio sewa bulanan (baik dengan perjanjian maupun tanpa perjanjian) yang berpotensi adanya risiko penagihan yang tidak tertagih. Untuk selanjutnya, Jiwasraya akan melakukan upaya pengosongan pada aset hunian sewa bulanan (nonkomersil) agar dapat diberdayakan menjadi sewa tahunan (sewa wajar/sewa komersil), peningkatan penguasaan aset agar tidak ada okupansi liar dan pemanfaatan hasil sewa oleh pihak ketiga, melakukan kajian sewa wajar dengan data pembanding yang relevan dan melakukan *monitoring* dan pengembangan aplikasi properti berbasis web (telah masuk dalam program kerja RKAP 2016). ●

## Rekomendasi BPK

- a. Mengupayakan optimalisasi pendapatan sewa dengan melakukan kajian atas penetapan harga sewa dan membuat perikatan dengan pihak penyewa.
- b. Membuat SOP terkait dengan mekanisme penagihan dan penatausahaan pendapatan sewa.
- c. Segera menyelesaikan permasalahan terkait penetapan tarif sewa, tunggakan sewa, dan sewa tanpa ijin serta melaporkannya ke BPK.

# Perbaiki Program Pensiun

Pelaksanaan program pensiun saat ini belum dapat menjamin kesejahteraan pensiunan PNS, TNI, dan Polri sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU Nomor 40 tentang SJSN.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II 2019 yang terdiri atas 1 LHP keuangan (1 persen), 267 LHP kinerja (54 persen), dan 220 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (45 persen).

Salah satu hasil pemeriksaan yang signifikan yakni pemeriksaan kinerja atas efektivitas program pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua tahun 2018 hingga semester I tahun 2019. Pemeriksaan itu dilaksanakan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), KemenPANRB, Badan Kependidikan dan Pengembangan Pegawai (BKN), PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, program pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua tidak efektif. Hal itu disebabkan tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah belum menetapkan peraturan pelaksanaan terkait jaminan pensiun PNS sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu paling lambat 2 tahun sejak UU diundangkan. Sementara itu, dalam pelaksanaan pengelolaan pensiun, masih terdapat beberapa permasalahan, di antaranya belum ada peraturan yang jelas mengenai pengelola program pensiun, belum ada penunjukan dewan pengawas yang bertanggung

jawab secara langsung terhadap pengelolaan program pensiun, dan belum ada penetapan besaran iuran pemerintah selaku pemberi kerja pensiun sejak tahun 1974.

Akibatnya, pertanggungjawaban pelaksanaan program pensiun PNS, TNI, dan Polri oleh Pemerintah untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua belum transparan dan akuntabel, serta belum tercapainya tujuan reformasi program pensiun PNS, TNI, dan Polri sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN dan sesuai dengan jaminan sosial nasional.

Pemerintah juga belum menyusun peraturan pelaksanaan terkait pengalihan program Pensiun PNS, TNI, dan Polri kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. UU tentang BPJS tersebut mengamanatkan penyelesaian pengalihan bagian program Pensiun PNS, TNI, dan Polri yang sesuai UU Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 2029.



Hal itu menyebabkan pelaksanaan program pensiun saat ini belum dapat menjamin kesejahteraan pensiunan PNS, TNI, dan Polri sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU Nomor 40 tentang SJSN.

BPK juga menemukan kewajiban pemerintah atas jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri belum dihitung dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sementara, jaminan pensiun dan penghargaan atas hak PNS tersebut menimbulkan konsekuensi kewajiban pemerintah dalam hal pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan program pensiun.

Selain itu, pemerintah tidak lagi mewajibkan badan penyelenggara untuk menyampaikan laporan aktuaris sebagai bagian dari laporan berkala yang harus disampaikan kepada pemerintah, sehingga pengelolaan risiko keuangan negara belum mempertimbangkan kewajiban pemerintah atas perhitungan aktuaris dalam program jaminan Pensiun PNS, TNI, dan Polri.

Akibatnya, terdapat risiko peningkatan belanja pensiun di masa depan yang akan berdampak pada penurunan manfaat pensiun, peningkatan iuran sampai dengan keberlangsungan program jaminan pensiun bagi PNS, TNI, dan Polri.

Pengelolaan akumulasi iuran pensiun (AIP) juga belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Di antaranya, pemerintah tidak mengatur bentuk pengelolaan risiko investasi saham yang mengalami penurunan nilai dan penyertaan langsung, serta belum menetapkan kebijakan sanksi atas adanya penurunan dana AIP dan/atau capaian hasil investasi AIP yang tidak mencapai target oleh badan penyelenggara. Terdapat pula penempatan saham yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian pada PT Asabri dan penyertaan langsung PT Taspen pada PT WTR belum sepenuhnya sesuai dengan PMK terkait Pengelolaan AIP.

Kondisi itu membuat capaian kinerja atas pengelolaan dan penggunaan dana AIP belum memberikan hasil yang mak-

simal dan dapat diukur secara andal.

## Rekomendasi BPK

Terkait tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan Menteri PANRB yang berwenang menetapkan kebijakan tentang sistem pensiun PNS serta instansi terkait lainnya.

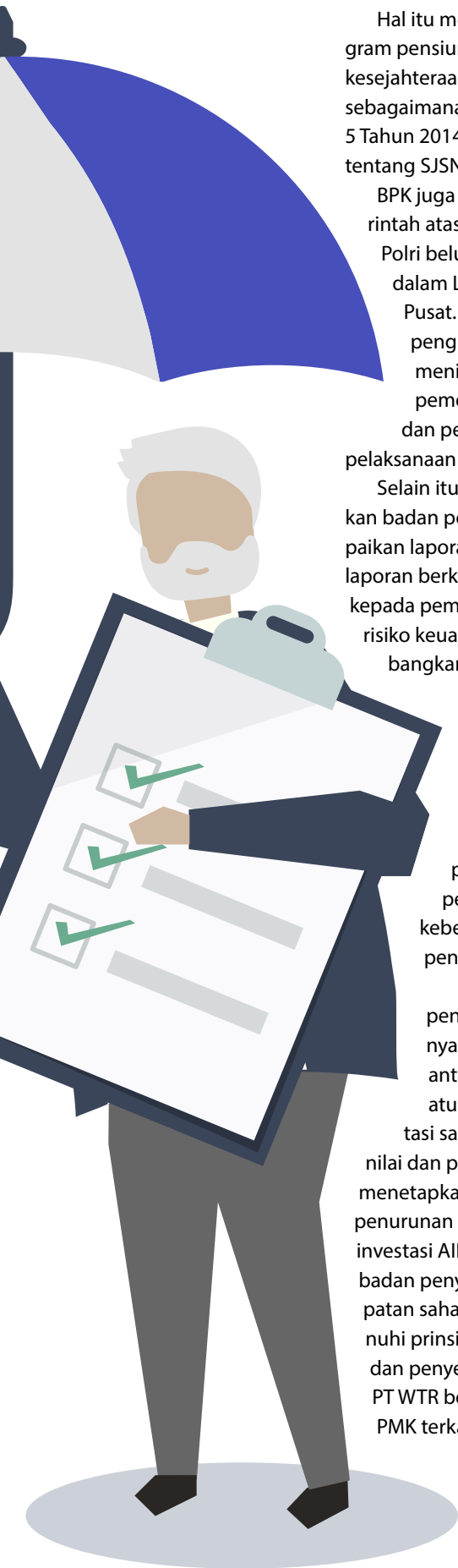
BPK juga merekomendasikan kepada Menteri PANRB agar menyusun rencana penyelesaian peraturan pelaksanaan mengenai pengelolaan program jaminan pensiun, serta ketentuan gaji, tunjangan, dan fasilitas sesuai amanat UU Nomor 2014 tentang ASN. Selain itu, Menteri PANRB perlu menyusun rencana penyelesaian peraturan pelaksanaan terkait pengalihan program pensiun PNS, TNI, dan Polri yang sesuai kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Rekomendasi lainnya, Menteri Keuangan agar melakukan *monitoring* dan evaluasi secara periodik atas tindak lanjut pengendalian risiko dan perbaikan kinerja investasi saham yang dilakukan oleh PT Asabri dan tindak lanjut penjaminan investasi penyertaan langsung kepada PT WTR yang lebih aman dan konservatif oleh PT Taspen. Menteri Keuangan perlu pula menetapkan ketentuan sanksi atas adanya penurunan dana AIP dan/atau capaian hasil investasi AIP yang tidak mencapai target oleh badan penyelenggara.

Kemudian, Menteri Keuangan direkomendasikan agar meminta direktur PT Asabri untuk menetapkan pengendalian risiko investasi saham saat pembelian dan apabila saham mengalami penurunan nilai, serta membuat *action plan* dan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja investasi saham pada PT Asabri yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan sudah mengalami penurunan nilai.

## Pemeriksaan kinerja BPJS Ketenagakerjaan

Selain soal program pensiun PNS, TNI, dan Polri, BPK Pada semester II 2019 pun telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada badan lainnya dengan tema pemerataan pembangunan. Pemeriksaan tersebut meliputi pengelolaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.



vecteezy

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, pengelolaan kepesertaan cukup efektif, namun terdapat permasalahan yang dapat mengganggu keberhasilan upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam peningkatan dan pengelolaan kepesertaan antara lain belum seragamnya penetapan *key performance indicator* (KPI) pengelolaan dan perluasan kepesertaan pada Deputy Direktur (Depdir) Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi (KSI) dan Depdir Bidang Kepesertaan Program Khusus (KPS) dengan kantor cabang dan kantor wilayah. Hal tersebut mengakibatkan penilaian pencapaian target penerimaan iuran menjadi bias karena tidak menunjukkan penilaian kinerja per segmen.

BPJS Ketenagakerjaan juga belum melakukan tata kelola *database* kepesertaan secara *update* dan berkesinambungan. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih diperoleh data nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak valid dan data *fields* yang tidak terisi *record* seperti nama lengkap, nama ibu kandung, tanggal lahir, nomor *handphone*, dan jenis kelamin.

BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, antara lain agar Direktur Kepesertaan segera mengusulkan KPI penambahan kepesertaan memerhatikan ketentuan dan mengusulkan KPI penerimaan iuran dengan memisahkan iuran per segmen secara terperinci.

Selain itu, Direktur Perencanaan Strategis dan TI segera menetapkan usulan KPI penerimaan iuran di BPJS Ketenagakerjaan per segmen. BPK juga merekomendasikan Direktur Keuangan melaksanakan *risk assessment* dan kajian yang lengkap dan memadai menyangkut permasalahan tenaga kerja *not active* dan NIK tidak valid. Direktur Kepesertaan juga perlu memiliki data potensi sekunder dari sumber kelembagaan dan instansi yang handal, serta mengoptimalkan fungsi SMILE atas kondisi data potensi yang belum ditindaklanjuti dan valid.

### **Pemeriksaan investasi BUMN**

Pengelolaan investasi di perusahaan BUMN tak lepas dari pengawasan BPK. BPK telah menyelesaikan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pendapatan, biaya,

dan investasi terhadap 11 objek pemeriksaan pada 11 BUMN/anak perusahaan, di antaranya PT Yodya Karya (PT YK) (Persero), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero), PT Inhutani I, PT Sucofindo (Persero), Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, dan PT Asuransi Jasaraharja Putera/PT JP.

Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN pada 2016 hingga triwulan III 2019. Hasil pemeriksaan menyimpulkan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 10 objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama aset hasil revitalisasi penyertaan modal negara (PMN) pada PT Sang Hyang Seri (Persero) belum dimanfaatkan di antaranya empat pabrik pengolahan benih yang dibangun dengan dana sebesar Rp94,54 miliar.

Selain itu, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) belum menerima pendapatan dan denda sebesar Rp33,80 miliar dan 416,71 ribu dolar AS dari sewa lahan Sei Mangkei. BPK merekomendasikan kepada Direksi BUMN/anak perusahaan terkait agar mengupayakan pendayagunaan aset pabrik dan sarana perusahaan.

Selain itu, perlu ada peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi perusahaan. BPK juga menyarankan agar dilakukan upaya penagihan atas kekurangan penerimaan, piutang, dan pemulihan atas kerugian perusahaan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN mengungkapkan 137 temuan yang memuat 227 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 119 kelemahan sistem pengendalian intern, 98 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp204,95 miliar, dan 10 permasalahan 3E sebesar Rp118,89 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN/anak perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp1,83 miliar. ●



Hasil pemeriksaan menyimpulkan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 10 objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan.



# WASPADA COVID-19

**SIAPA SAJA YANG PERLU  
MELAKUKAN PEMERIKSAAN  
KESEHATAN KE RUMAH SAKIT?**

Pernah kontak dengan pasien (+) COVID-19 (berada dalam satu ruangan yang sama/kontak dalam jarak satu meter) ATAU pernah berkunjung ke negara/daerah endemis COVID-19 dalam 14 hari terakhir

## BILA IYA

Sedang atau pernah mengalami:

- Demam ( $>38^{\circ}\text{C}$ )
- Pilek
- Batuk
- Sesak Napas

## BILA TIDAK

Sedang atau pernah mengalami:

- Demam ( $>38^{\circ}\text{C}$ )
- Pilek
- Batuk
- Sesak Napas

## IYA

Hubungi 119 ext 9 atau periksakan diri ke rumah sakit rujukan COVID-19 di daerah Anda

## TIDAK

Karantina diri Anda selama 14 hari terhitung setelah kontak atau kunjungan

## IYA

Periksakan diri ke dokter terdekat dan istirahat yang cukup

## TIDAK

Anda tidak perlu memeriksakan diri ke dokter. Jaga selalu kesehatan Anda

Selama 14 hari karantina diri, Anda mengalami: **demam lebih dari  $38^{\circ}\text{C}$ , pilek, batuk, sesak napas**

## IYA

Hubungi 119 ext 9 atau periksakan diri ke rumah sakit rujukan COVID-19 di daerah Anda

## TIDAK

Anda tidak perlu memeriksakan diri ke dokter. Jaga selalu kesehatan Anda



# BPK Perkuat Pemeriksaan LKPD

Mulai tahun ini, Anggota V dan Anggota VI BPK akan menyampaikan laporan pemeriksaan yang memerlukan perhatian khusus di Sidang Badan.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencatat perbaikan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam beberapa tahun terakhir. Seperti dicantumkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2019, BPK telah memeriksa 542 LKPD Tahun 2018. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 443 LKPD atau 82 persen dari keseluruhan LKPD. Angka itu melonjak dari tingkat opini WTP LKPD pada 2014 yang sebesar 47 persen.

Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar mengapresiasi tren perbaikan LKPD tersebut. Dia mengatakan, opini WTP adalah sebuah keharusan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

"Laporan keuangan adalah *bottomline* dari akuntabilitas. Artinya ini yang paling bawah dan memang sebuah keharusan dan kewajiban," kata Bahrullah kepada *Warta Pemeriksa*.

Seiring dengan perbaikan tren opini LKPD, Bahrullah mengatakan, BPK akan melakukan perubahan fokus dari pemeriksaan laporan keuangan menjadi pemeriksaan kinerja. Dia menekankan, peningkatan kinerja dan nilai tambah dari suatu belanja akan semakin disoroti.

Bahrullah mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyiapkan *piloting* pemeriksaan kinerja untuk lima daerah yakni Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Lampung, Banten, dan Aceh. Dia menyampaikan, pemeriksaan kinerja di daerah-daerah tersebut akan disesuaikan dengan karakter pembangunan dan permasalahan masing-masing daerah.

Dia menyebutkan, pemeriksaan kinerja untuk Jawa Timur dan Lampung akan menyoroti isu infrastruktur, Banten terkait penanganan bencana, Aceh mengenai otonomi khusus, dan DKI Jakarta mengenai polusi udara. "Hal ini dilakukan dalam rangka melihat

kualitas belanja masing-masing daerah terkait isu-isu tersebut," kata Bahrullah.

Bahrullah mengatakan, pemeriksaan serupa juga akan dilakukan di Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI yang menangani entitas pemerintah daerah di wilayah Indonesia timur. Mulai tahun ini, Anggota V dan Anggota VI BPK juga akan menyampaikan pekerjaan terutama objek laporan pemeriksaan yang memerlukan perhatian khusus di Sidang Badan.

Selain itu, BPK juga akan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan daerah. Hal itu akan diserahkan kepada gubernur dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing provinsi. Laporan itu akan memuat berbagai hasil pemeriksaan BPK di daerah tersebut baik pemeriksaan laporan keuangan maupun pemeriksaan tematik. "Sehingga, kita harapkan laporan itu bisa menjadi bahan kebijakan gubernur dalam melihat daerahnya," kata Bahrullah.

Bahrullah menyampaikan, saat ini permasalahan yang masih sering menjadi temuan dalam pemeriksaan LKPD antara lain menyangkut permasalahan sistem pengendalian intern. Dia menjelaskan, penatausahaan aset tetap tidak tertib, antara lain aset tetap masih dicatat dengan nilai sebesar Rp0,00 dan Rp1,00 sehingga belum menggambarkan harga perolehan aset tetap, aset tetap dicatat secara gabungan atau tanpa rincian dengan nilai yang signifikan, atau aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan dikuasai pihak lain.

Selain itu, terdapat temuan pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak tertib. Pemerintah kabupaten/kota belum melakukan verifikasi dan validasi *database* wajib pajak PBB yang diserahkan dari KPP karena pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak tertib. Hal itu yaitu sekolah tidak memi-

shakan penyimpanan di rekening antara dana BOS dan dana komite sekolah atau dana lainnya. Sekolah tidak melaporkan aset tetap yang diperoleh dari penggunaan dana BOS kepada pemerintah daerah sehingga tidak tersaji dalam laporan keuangan serta rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran dana BOS tidak rutin dilakukan antara sekolah dan pemerintah daerah.

Selain itu, terdapat permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan seperti kekurangan volume pekerjaan fisik pada realisasi belanja modal mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan, penerima hibah/bansos tidak menyampaikan laporan pertanggung-

jawaban penggunaan dana hibah kepada kepala daerah sehingga tidak dapat diketahui kesesuaian penggunaannya dengan proposal yang diajukan sebelumnya, dan pertanggungjawaban realisasi belanja barang dan jasa tidak riil seperti realisasi belanja perjalanan dinas.

Bahrullah mengatakan, untuk meningkatkan kualitas opini LKPD menjadi 100 persen WTP, pimpinan daerah perlu memiliki *dashboard* sebagai indikatornya dalam pengelolaan keuangan negara.

Dia mengibaratkan, seseorang yang mengendarai mobil akan memeriksa ketersediaan bahan bakar dan memerhatikan kecepatan melalui *dashboard* yang ada.

"Jadi sistem sumber daya manusianya, pemahaman tanggung jawab terhadap fungsi keuangan seperti sekretaris daerah (sekda), Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan inspektorat perlu lebih intens. Ini tentunya juga butuh *political will* dari pimpinan daerahnya," ujar Bahrullah.

Apabila seluruh pimpinan daerah sudah bisa mematuhi seluruh indikator yang ada, pemeriksaan keuangan daerah akan masuk ke bagian

”

Laporan keuangan adalah *bottomline* dari akuntabilitas. Artinya ini yang paling bawah dan memang sebuah keharusan dan kewajiban.



■ Bahrullah Akbar, Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V

yang lebih besar yakni pemeriksaan kualitas belanja tersebut. "Itu sebabnya kita melakukan sejumlah *piloting* untuk melihat kinerja dan semoga bisa menjadi stimulus ke depannya," kata Bahrullah.

#### Alat Ukur

Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Harry Azhar Azis mengatakan, tingkat kesadaran para pejabat pemerintah daerah dalam menegakkan akuntabilitas semakin baik. Hal itu ditunjukkan dari pemeriksaan BPK yang menghasilkan opini WTP semakin mendekati 100 persen.

"Di zaman saya DPR dan saya menjadi Ketua Banggar pada 2009, pemerintah daerah yang memperoleh WTP baru tiga persen," kata Harry. Harry mengatakan, ke depannya perlu ada alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemerintah daerah. Dia mengusulkan, hal itu bisa menggunakan indikator target pembangunan atau *welfare index*. Indikator itu terdiri atas tingkat kemiskinan, pengangguran, rasio gini, dan indeks pembangunan manusia (IPM).



■ Harry Azhar Azis, Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI

Menurut Harry, pemerintah daerah yang berhasil mencapai tingkat kemakmuran di seluruh indikator lebih baik dari rata-rata nasional dapat dianggap berhasil. Meski begitu, dia mengakui terdapat daerah yang belum mampu mencapai keseluruhan target pembangunan tersebut. Bahkan, ujarnya, terdapat daerah yang sama sekali belum bisa mencapai target pembangunan tersebut. “Umumnya ini adalah daerah timur seperti Maluku, NTT, dan Papua,” ujar Harry.

Harry juga mengusulkan satu indikator tambahan yakni indeks pelayanan publik. Hal itu akan mengukur pelayanan seperti pengurusan KTP, izin usaha, dan lain-lain. “Saya sudah meminta kepada seluruh kepala perwakilan yang ada di wilayah saya untuk mulai memikirkan hal itu,” kata Harry.

Nantinya, hal itu akan disertakan dalam catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, BPK akan melihat pengaruh antara akuntabilitas anggaran berdasarkan laporan keuangan dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.

Senada dengan Bahrullah, Harry menilai, per-

”

Ke depannya perlu ada alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemerintah daerah.

masalah pemerintah daerah dalam menyajikan LKPD yang sesuai harapan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kemudian, ujarnya, sistem pelaporan yang masih kurang di daerah kerap menyebabkan munculnya temuan dalam pemeriksaan.

“Misalnya, bupati lama suka membawa aset pemerintah daerah seperti mobil pulang. Kalau bupati, kepala dinas, dan lainnya itu membawa pulang semua mobil dinas *kan* jumlahnya besar. Itu

mempengaruhi opini,” kata Harry.

Menurut Harry, hal itu berkaitan erat dengan budaya akuntabilitas yang masih perlu ditegaskan. Kemudian, ujarnya, pimpinan daerah perlu memperbaiki sistem informasi pengelolaan keuangan di daerahnya. Sehingga, seorang pemimpin daerah dapat lebih waspada dan mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada.

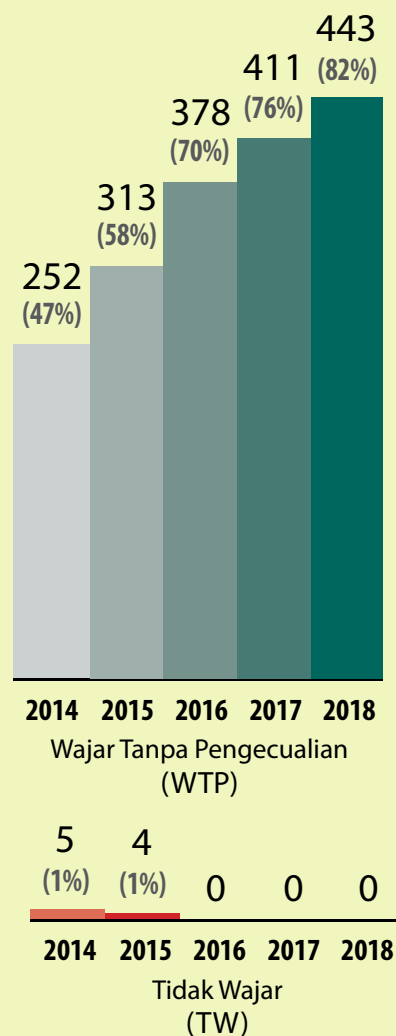
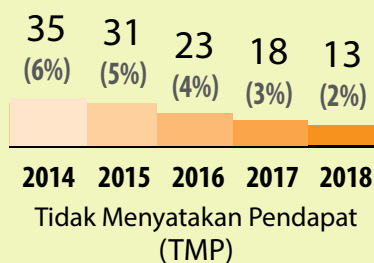
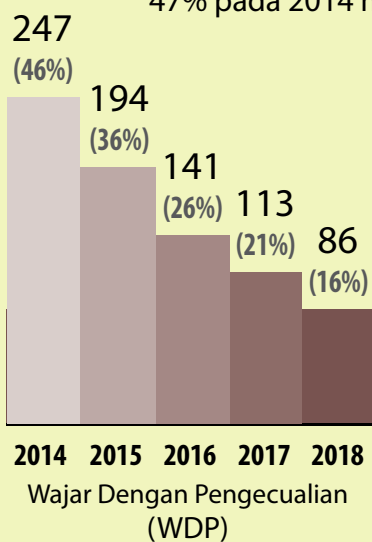
“Sehingga, ketika pemerintah daerah bisa mengelola anggarannya akan membuat orang-orang yang masih menggangu bisa bekerja dan secara otomatis akan menurunkan kemiskinan,” ujar Harry. ●



# Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Tahun 2018

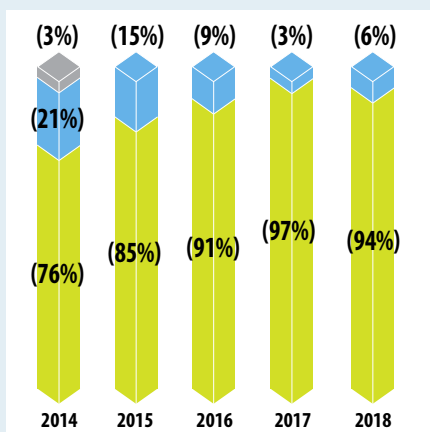
## PERKEMBANGAN OPINI LKPD 2014-2018

Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula hanya 47% pada 2014 menjadi 82% pada 2018.

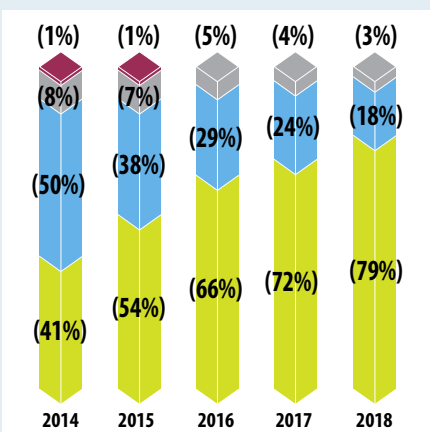


## PERKEMBANGAN OPINI LKPD 2014-2018 MENURUT PEMERINTAHAN

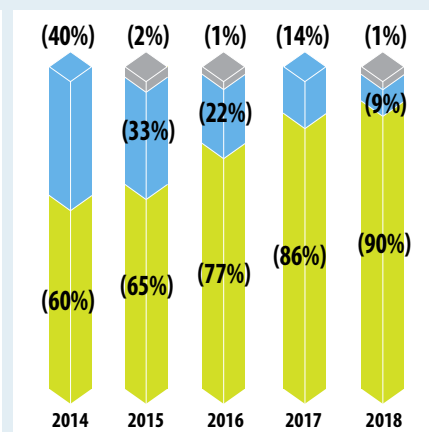
### PROVINSI



### KABUPATEN



### KOTA



WTP

WDP

TMP

TW

Sumber: IHPS | 2019

# Pemeriksaan Kelayakan Investasi dari Hulu ke Hilir



BPK melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi tata kelola keuangan serta investasi agar BUMN tidak merugi, terutama dari kemungkinan investasi berisiko.

**K**etua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna sedari awal menyatakan BPK akan terus melakukan pembenahan. Termasuk di antaranya mengubah citra dari lembaga stempel WTP menjadi badan yang ikut dalam menjaga keuangan negara dari penyimpangan.

Terkait hal tersebut, Auditor Utama Keuangan Negara VII Akhsanul Khaq menjelaskan, BPK dalam fungsi mengawal harta negara, me-

lakukan pemeriksaan dari hulu hingga hilir, tak terkecuali soal investasi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BPK melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi tata kelola keuangan serta investasi agar BUMN tidak merugi, terutama dari kemungkinan investasi berisiko.

"Paling penting dari kami dalam setiap rekomendasi investasi BUMN adalah menjaga prinsip kehati-hatian," ucap dia.

Setiap BUMN memiliki kekhasan tersendiri dalam berinvestasi. BUMN energi, misalnya, bisa berinvestasi dalam bentuk pembuatan kilang dan akuisisi perusahaan di bidang eksplorasi dan eksploitasi.

Kemudian BUMN infrastruktur, berinvestasi dalam pembangunan jalan tol atau akuisisi badan usaha jalan tol. Sektor perkebunan inves-

tasinya dalam bentuk akuisisi pabrik gula dan sektor keuangan bisa berupa dalam jaringan ATM demi memperlancar transaksi.

“Ada juga dalam arti sempit, investasi dalam bentuk surat berharga, yaitu saham, obligasi dan reksa dana. Walau misalnya BUMN energi melakukan investasi obligasi, bukan untuk mencari untung tapi mengolah kelebihan keuntungan perusahaan agar optimal,” ucap dia kepada *Warta Pemeriksa*.

Dalam menelisik proses investasi BUMN, BPK melakukan pemeriksaan mulai dari perencanaan (rencana kerja perusahaan), pelaksanaan, dan kondisi terkini.

“Dalam proses perencanaan tentu ada rencana kerja perusahaan, di mana sudah dibahas di Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu juga ada kajian kelayakan investasi,” ungkap dia.

Dalam proses akuisisi, BPK juga memeriksa nilai investasi berdasarkan angka yang dikeluarkan jasa penilai investasi.

Berikutnya, BPK memeriksa kelayakan investasi, terutama faktor risiko. “Apakah ada risiko, misalnya risiko hukum, apakah objeknya memiliki sengketa atau juga misalnya kita melihat seperti apa prospek dari investasi yang dilakukan.”

Studi kelayakan lain adalah memeriksa *nett present value* dan *internal rate return*. “Saat dieksekusi, atau dinyatakan layak, apakah syarat-syarat dipenuhi, terutama terkait kontrak. Bahkan BPK memeriksa, apakah setelah dilakukan akuisisi, BUMN mengeluarkan uang kembali untuk perbaikan. Misalnya akuisisi jalan tol, tapi ternyata banyak kerusakan,” ungkap dia.

Pemeriksaan ini penting untuk meminimalkan kerugian atau potensi kerugian. BPK usai pemeriksaan memberikan rekomendasi agar perusahaan menjalankan tata kelola dengan benar.

“Misalnya, maka rekomendasi kami evaluasi dari operasional pabrik gula. Apakah operasional itu biayanya lebih tinggi dari pendapatannya. Bila memungkinkan biaya ini bukan ditekan tanpa mengorbankan kualitas. Namun bila langkah itu tak mungkin dilakukan maka perlu ada *cut loss*, jadi jangan dibiarkan merugi terus. Jadi harus ada penyelamatan, bisa dijual atau ada investasi



”

**Paling penting dari kami dalam setiap rekomendasi investasi BUMN adalah menjaga prinsip kehati-hatian.**

untuk modernisasi dari pabrik gula itu,” ucap dia.

Ia mengatakan, rekomendasi hasil pemeriksaan yang dikeluarkan BPK diawasi Kementerian BUMN alias pemerintah sebagai pemegang saham. Rekomendasi BPK juga berdasarkan regulasi yang ada, seperti regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Salah satu regulasi itu adalah Peraturan OJK Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. POJK itu salah satunya mengatur bahwa investasi yang dilakukan harus memiliki kajian risiko, baik risiko keuangan, risiko hukum, dan risiko lainnya.

Sayangnya, ungkap Akhsanul, terkadang ada perusahaan BUMN yang menabrak atau melangkah tidak sesuai rekomendasi.

Dalam berinvestasi *medium term note* atau surat utang jangka menengah, misalnya, Pefindo mengeluarkan rekomendasi peringkat dari perusahaan penerbit *medium term note*. “Jadi harusnya kalau Pefindo sudah mengeluarkan peringkat di bawah ya jangan dibeli,” tutur dia.

Begitu juga saat komite investasi memeriksa perusahaan yang mengeluarkan surat utang. Bila tidak layak, sepatutnya BUMN tidak meneruskan membeli surat utang.

Pada intinya, ucap dia, BPK melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi agar BUMN tidak merugi, termasuk dalam hal investasi. Oleh karena itu, BUMN perlu mengikuti aturan investasi, terutama menjaga prinsip kehati-hatian. ●

# BPK Tampilkan Aplikasi iDance di Praha

Meskipun tidak tergabung dalam negara anggota EUROSAI, aplikasi iDance yang dikembangkan oleh tim BPK menjadi salah satu dari aplikasi terpilih yang dipublikasikan dalam *website* hackathon.

**B**adan Pemeriksa Keuangan dengan mengusung tema “Hack for Accountability”, mengirimkan tim beranggotakan lima orang untuk berpartisipasi dalam 1st International Hackathon of SAIs di Praha, Republik Ceko pada 3 hingga 5 Maret 2020.

BPK berpartisipasi sebagai *observer* perwakilan negara Asia dan peserta kompetisi. Sebagai *observer*, BPK ingin mengetahui perkembangan teknologi informasi yang digunakan dalam bidang pemeriksaan di level kawasan Eropa sekaligus *benchmarking* penyelenggaraan hackathon tersebut.

Gelaran ini diselenggarakan oleh *State Audit Office of the Czech Republic* atau Nejvyšší Kontrolní Úřad (NKU) sebagai salah satu dari rangkaian acara kegiatan EUROSAI Congress 2020. 1st International Hackathon of SAIs merupakan ajang kompetisi bagi para *programmer*, ahli IT, analis data, desainer grafis, dan auditor di negara-negara anggota EUROSAI dengan tujuan untuk mengembangkan perangkat lunak berupa program, aplikasi, atau visualisasi yang dapat mendukung proses pelaksanaan pemeriksaan secara efektif dan efisien, sekaligus meringankan beban pekerjaan auditor.

Selain sebagai *observer*, tim BPK berperan secara proaktif dalam kompetisi tersebut sebagai



peserta tamu dengan mempromosikan prototipe program aplikasi pemeriksaan yang disebut dengan iDance atau *Interactive Data Analytic Center*.

Aplikasi ini membantu pemeriksa dalam mengklasifikasi, menganalisis data, sekaligus mengidentifikasi transaksi yang berpotensi mengandung *fraud*. Data yang digunakan sebagai sampel dalam aplikasi tersebut adalah data transaksi pengeluaran belanja pemerintah dan data transaksi bank.

Secara teknis, dalam mengikuti acara yang berlangsung, seluruh peserta diberikan kebe-



basan dalam membentuk dan memilih rekan satu timnya. Setiap SAI diperbolehkan membentuk tim dengan rekan senegarannya atau berkolaborasi dengan tim dari negara lain.

Secara keseluruhan, peserta 1st International Hackathon of SAIs dibagi menjadi 11 tim. Tim yang telah terbentuk kemudian ditantang untuk membuat aplikasi, program, atau visualisasi dalam waktu dua hari dan selanjutnya mempresentasikan ide berikut solusi yang ditawarkan oleh aplikasi atau program tersebut di hadapan dewan juri.

Dewan juri terdiri atas tujuh orang yang dipilih berdasarkan keahliannya masing-masing, yaitu dalam bidang audit, data statistik, *organizational development*, analisis data, jurnalis, termasuk pakar pengembangan pendidikan.

Selain itu, penampilan dan kemampuan komunikasi tim peserta pada saat presentasi juga dinilai, apakah tim peserta mampu mengemukakan ide dan solusinya secara meyakinkan, jelas, berkualitas, dan tepat waktu. Ini mengingat setiap tim hanya diberikan waktu untuk mendemonstrasikan hasil karyanya selama 3 menit.

Dalam menilai tim peserta hackathon, setiap juri masing-masing memilih 5 aplikasi atau program yang menawarkan ide dan solusi terbaik. Tim peserta dengan pilihan terbanyak akan diseleksi



dan didiskusikan kembali oleh dewan juri untuk kemudian dinobatkan sebagai pemenang I, II, dan III.

Meskipun tidak tergabung dalam negara anggota EUROSAI, aplikasi iDance yang dikembangkan oleh tim BPK menjadi salah satu dari aplikasi terpilih yang dipublikasikan dalam website hackathon dan dapat diakses melalui [hackathon.eurosai2020.cz](http://hackathon.eurosai2020.cz). Hasil dari kegiatan ini rencananya juga akan dipresentasikan pada saat *workshop* EUROSAI Congress pada 31 Mei - 4 Juni 2020 di Praha, Republik Ceko.

Kegiatan ini diikuti oleh total 68 peserta dari 23 negara-negara Eropa, termasuk Republik Ceko, Albania, Austria, Belarus, Kroasia, Estonia, Perancis, Finlandia, Belanda, Malta, Macedonia, Spanyol, Jerman, Polandia, Rusia, Lithuania, Turki, Slovakia, Inggris, dan Swedia. ●

# BPK Aktif dalam Pertemuan Virtual Anggota Komite Pengarah Intosai WGEA

Sebanyak 30 peserta dari 15 SAI anggota Steering Committee WGEA hadir dalam pertemuan tersebut.

**W**abah pandemi korona (Covid-19) membuat pola kerja yang dijalani Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berubah. Misalnya ketika Rapat Komite Pengarah Intosai WGEA (the 17th Steering Committee Meeting of Intosai WGEA).

Karena wabah yang menyebar cepat, pertemuan tersebut pun digelar secara virtual. Pertemuan virtual ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dibatalkannya the 17th Steering Committee Meeting of INTOSAI WGEA di Marrakech, Maroko.

Ikut terlibat dalam rapat virtual tersebut yaitu Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif. Pertemuan dipimpin langsung oleh BPK (Supreme Audit Institutions/SAI) Finlandia selaku ketua kelompok kerja Audit Lingkungan WGEA (Working Group on Environmental Audit) Intosai (Organisasi BPK Internasional/ International Organisation Supreme Audit Institutions). Tytti Yli-Viikari, auditor general dari SAI Finlandia membuka pertemuan secara resmi pada 24 Maret 2020 pukul 15.00 WIB.

Sebanyak 30 peserta dari 15 SAI anggota Steering Committee WGEA hadir dalam pertemuan tersebut. Selain Sekjen BPK, turut hadir dalam pertemuan tersebut delegasi BPK lainnya, yaitu kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) Hery Subowo dan tim kelompok kerja (Pokja) WGEA.

Pada pertemuan yang diselenggarakan pada 23-26 Maret 2020, BPK tidak hanya



berperan sebagai *steering committee member*. Akan tetapi juga selaku ketua *project* untuk Working Package 4: Sustainable Cities and Communities: Focusing on Sustainable Transport bersama SAI Cina dan SAI Thailand. Kemudian menjadi ketua pada Working Package 6: Sharing Experience and Capacity Building on Auditing the SDGs.

Selain itu, BPK juga berperan sebagai anggota subkomite pada dua *working package* lainnya, yaitu Working Package 2: Responsible Consumption and Production-focusing on Plastic Waste yang diketuai oleh SAI India. Kemudian Working Package 3: Climate Action focusing on Climate Finance yang diketuai oleh SAI Amerika Serikat.

Pada akhir pertemuan, anggota *steering committee* akan menyetujui *vision paper* atas *working package* yang terdapat pada Intosai WGEA Work Plan 2020-2022. Termasuk juga penentuan jadwal (*timelines*) pengerjaan dari berbagai *working package* dimaksud. ■

**DANIEL LUMBAN TOBING,**  
 ANGGOTA VII BPK RI/  
 PIMPINAN PEMERIKSAAN  
 KEUANGAN NEGARA VII BPK RI

# Menjaga Arah BUMN

**D**aniel Lumban Tobing kini mengemban tanggung jawab sebagai Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Salah satu tugasnya yakni memastikan pengelolaan keuangan negara di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Berbekal pengalamannya di dunia profesional, Daniel akan menyoroti upaya perusahaan pelat merah dalam menjaga ketahanan pangan dan energi di Indonesia. Kepada *Warta Pemeriksa*, Daniel memaparkan sejumlah rencana yang akan dikerjakannya di BPK. Berikut petikan wawancaranya:



■ Daniel Lumban Tobing, Anggota VII BPK RI/  
 Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK RI



**Bapak memiliki karir cemerlang di industri elektronika sebelum menjadi anggota DPR dan kini menjadi anggota BPK. Bagaimana cerita perjalanan karier Bapak sampai akhirnya sekarang menjabat sebagai anggota BPK?**

Setelah menamatkan pendidikan S1 bidang elektronika di University of Kyoto, saya bekerja sebagai manajer di PT Hirose Elektrik di Bekasi, sebuah perusahaan elektronik yang menerapkan standar manufaktur dari Jepang. Selanjutnya, saya menjadi General Manager di PT Indonesia Epson Industry selama 12 tahun sebelum pada 2009 saya lolos menjadi anggota DPR. Sebagai Anggota DPR periode 2009-2014 dari PDIP, saya pernah bertugas di Komisi IV serta di Komisi VI. Dalam kurun waktu tersebut, saya juga terpilih menjadi wakil ketua DPD PDIP Jawa Barat dan anggota Kadin Indonesia periode 2010-2015.

Pada 2014-2019, saya kembali terpilih menjadi Anggota DPR dari PDIP dan bertugas di Komisi IX. Pengalaman dua periode sebagai wakil rakyat membuat saya ingin berkarya melalui lembaga pemeriksa yaitu BPK. Bersama 60-an pendaftar lainnya, saya mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan Komisi XI DPR. Saya bersyukur dan sekaligus tertantang untuk berbuat lebih banyak bagi negara ketika akhirnya saya terpilih ber-

sama empat anggota BPK lainnya dengan perolehan 41 suara.

**Hal apa saja yang menjadi motivasi Bapak saat mencalonkan diri sebagai anggota BPK?**

Selama menjadi anggota DPR, saya sering mengkritisi dan mendorong pemerintah untuk melakukan tata kelola yang lebih baik dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara antara lain terkait BUMN. Dalam beberapa kesempatan menjalankan tugas pengawasan DPR, saya meminta pemerintah lebih mengoptimalkan penerimaan pajak, mendorong pemenuhan kebutuhan listrik nasional termasuk program 35.000 MW, mendorong ketahanan energi nasional, memastikan peran pemerintah dalam pengelolaan utang BUMN, memberikan efisiensi BUMN melalui *holding* termasuk BUMN di bidang migas dan pupuk, sehingga BUMN mampu menghasilkan barang publik yang lebih terjangkau.

Saya melihat bahwa BPK sebagai lembaga pemeriksa memiliki tugas dan kewenangan yang lebih teknis dalam memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam hal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peran strategis BPK tersebut yang menjadi motivasi



saya untuk meneruskan implementasi pemikiran saya selama bertugas di DPR tersebut. Dengan harapan, dapat lebih mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mencapai tujuan para pendiri bangsa dan negara ini sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

**Hal apa saja yang akan menjadi perhatian Bapak selama menjabat sebagai Anggota VII dalam beberapa tahun ke depan?**

Secara umum, tentu saya akan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan secara baik di AKN VII yang memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, BUMN dan anak perusahaan bidang energi, infrastruktur, pangan dan komoditas pertanian, jasa keuangan, dan jasa lainnya. Secara lebih spesifik, saya akan menaruh perhatian terhadap upaya Kementerian BUMN dan upaya BUMN itu sendiri dalam hal ketahanan pangan atau *food security* dan ketahanan energi. Kedua hal ini merupakan hal yang fundamental bagi keberlangsungan bangsa dan negara kita, sekaligus sebagai modal utama dalam melakukan pembangunan menuju Indonesia yang lebih baik.

**Selain pemeriksaan rutin terhadap subsidi energi, apakah ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau pemeriksaan kinerja yang sedang dilakukan atau disiapkan dalam waktu dekat?**

Saat mengikuti *fit and proper test* oleh Komisi XI DPR, saya menyampaikan pentingnya rekomendasi BPK yang tepat, sehingga tindak lanjutnya lebih efektif dan hasil pemeriksaan BPK lebih bermanfaat. Saat itu, saya juga menekankan agar BPK memperbanyak pemeriksaan kinerja selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Untuk itu, saya akan menaruh perhatian lebih pada pemeriksaan kinerja dengan memperhatikan kapasitas pemeriksa di AKN VII dan mempertimbangkan topik pemeriksaan yang bermanfaat bagi

pemerintah dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Sebagai lembaga yang selalu mengembangkan diri dan mengadopsi praktik-praktik internasional terbaik, kita harus mengacu pada International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12, bahwa kita sebagai Supreme Audit Institutions (SAI) harus menciptakan nilai dan manfaat yang mampu membawa perbedaan. Dalam hal ini, kondisi yang lebih baik bagi masyarakat dan negara. Dalam hal pemeriksaan BUMN, nilai dan manfaat yang kita berikan sebagai lembaga pemeriksa sudah barang tentu salah satu yang utama adalah berupa rekomendasi yang mampu meningkatkan kinerja BUMN sebagai agen pembangunan dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara.

Program pemeriksaan BUMN yang diampu oleh AKN VII merupakan satu kesatuan dengan tugas BPK secara keseluruhan sehingga prioritas utama pemeriksaan adalah pemeriksaan yang berkolaborasi dengan pemeriksaan lainnya dalam rangka menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan negara. Kolaborasi pemeriksaan tersebut tentu harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadi isu publik. BPK harus peka terhadap harapan masyarakat dan harus dinamis dalam menetapkan fokus pemeriksaannya terutama antara lain berkaitan dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pertumbuhan ekonomi.

**Selama menjadi anggota DPR, Bapak kerap kali menyoroti soal *holding migas, target lifting* minyak mentah. Dengan jabatan sekarang sebagai Anggota VII, program atau pemeriksaan apa yang menjadi arahan Bapak untuk membantu kinerja negara di sektor migas?**

Sebagai Anggota VII, saya memiliki portofolio pemeriksaan salah satunya di bidang migas. Kondisi produksi dan konsumsi migas yang menempatkan Indonesia sebagai negara importir neto migas saat ini, merupakan tantangan tersendiri bagi BUMN terkait dan bagi pemeriksaan BPK.

”

Secara lebih spesifik, saya akan menaruh perhatian terhadap upaya Kementerian BUMN dan upaya BUMN itu sendiri dalam hal ketahanan pangan atau *food security* dan ketahanan energi.



Optimalisasi penggunaan energi baru terbarukan akan mendorong diversifikasi energi dengan baik untuk mengurangi beban fiskal.

Selain memastikan pasokan yang cukup, BUMN juga diharapkan mampu menjaga harga bahan bakar yang terjangkau dan stabil di seluruh wilayah Republik Indonesia. Di satu sisi, Pertamina maupun BUMN bidang energi lainnya diharapkan mendukung program ketahanan energi nasional dan di sisi lain juga diharapkan tetap berkontribusi dalam penerimaan Negara. BPK harus mampu mendorong harmonisasi kedua peran tersebut.

Defisit neraca migas merupakan masalah mendasar yang dihadapi pemerintah, sehingga memerlukan pembenahan secara integral. Selain penghematan dan rasionalisasi penggunaan energi berbasis minyak, pemerintah perlu melakukan transisi energi secara sistematis dan konsisten. Optimalisasi penggunaan energi baru terbarukan akan mendorong diversifikasi energi dengan baik untuk mengurangi beban fiskal. Kombinasi pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK dalam hal-hal tersebut saya harapkan mampu membantu kinerja negara di sektor migas.

**Ketua MPR beberapa waktu lalu meminta BPK melakukan audit terhadap seluruh BUMN asuransi dan dana pensiun. Bagaimana tanggapan Bapak?**

Permintaan Ketua MPR tersebut tentu harus kita lihat dalam perspektif pencegahan untuk menyikapi munculnya beberapa kasus ketidakpatuhan dan ketidakhati-hatian dalam pengelolaan BUMN asuransi dan dana pensiun selama ini. BPK tentu harus menyambut positif harapan Ketua MPR tersebut dengan memperhatikan kemampuan BPK dan mempertimbangkan risiko yang dimiliki oleh setiap BUMN. Saya akan memastikan bahwa para pemeriksa kita, khususnya di AKN VII, telah melakukan penilaian risiko yang dihadapi oleh BUMN. Dalam hal ini, khususnya BUMN asuransi dan dana pensiun. Berdasarkan risiko tersebut, BPK akan secara selektif melakukan pemeriksaan sehingga mampu memberikan rekomendasi yang tidak hanya bersifat kuratif atas hal yang telah terjadi, namun juga bersifat preventif dan perbaikan sistem untuk memitigasi dampak negatif atas ketidakpatuhan dan ketidakhati-hatian pengelolaan BUMN tersebut.

**Apa saja langkah yang Bapak siapkan untuk semakin meningkatkan kinerja BPK?**

Melalui pemeriksaan berbasis risiko, BPK akan lebih fokus dalam melakukan pemeriksaan dan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan *output* yang berkualitas.

Ketepatan waktu, kepatuhan terhadap standar, dan relevan dengan isu terkini merupakan parameter utama yang harus dipenuhi oleh suatu pemeriksaan yang menghasilkan *output* berkualitas. Selain itu, BPK harus memastikan sejak tahap perencanaan pemeriksaan bahwa *due-process* telah dilakukan dan senantiasa membangun komunikasi dengan para *stakeholder* untuk memastikan hasil pemeriksaan sesuai kebutuhan dan dimanfaatkan. Sistem di BPK harus mampu memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada pihak terperiksa dapat dilaksanakan atau aplikatif dan memberikan solusi yang efektif bagi pihak yang diperiksa.

Hasil pemeriksaan seperti itu tentu akan membuat BPK menjadi lembaga negara yang tidak semata hadir karena telah diatur dalam UUD 1945, namun juga hadir karena dibutuhkan serta menciptakan nilai dan manfaat yang mampu membawa perbedaan. Dengan demikian, kinerja BPK dan kepercayaan publik kepada BPK dengan sendirinya akan meningkat.

**Apa pesan Bapak untuk seluruh pegawai BPK?**

Saya mengharapkan seluruh personel di BPK mampu menghadirkan tata kelola organisasi yang baik sesuai perannya masing-masing. Termasuk pula senantiasa menciptakan sinergi dan kolaborasi internal untuk mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki. Selain itu, terutama bagi pemeriksa, kita tentu berharap agar dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan.

Sinergi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik akan memudahkan BPK untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan pemangku kepentingan atas pemeriksaan BPK sehingga pemeriksaan BPK akan lebih berkualitas dan bermanfaat, terutama dalam menghasilkan simpulan dan rekomendasi yang lebih akurat dan komprehensif. ●

# PROTOKOL ISOLASI DIRI

## PENANGANAN COVID-19

### SIAPA SAJA YANG HARUS MENGISOLASI DIRI?



Ketika seseorang yang sakit (demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/gejala penyakit pernapasan lainnya), namun tidak memiliki risiko penyakit penyerta lainnya (diabetes, penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan lainnya), maka secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan, tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah, atau ke tempat-tempat umum.

Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang memiliki gejala demam/gejala pernapasan dengan riwayat dari negara/area transmisi lokal, dan/atau orang yang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19.

### YANG DILAKUKAN SAAT ISOLASI DIRI JIKA SAKIT, TETAP DI RUMAH

Jangan pergi bekerja, ke sekolah, atau ke ruang publik untuk menghindari penularan COVID-19 ke orang lain di masyarakat.

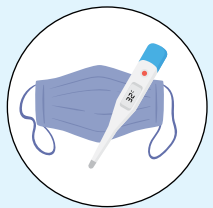


**Harus mengisolasi diri dan memantau diri sendiri untuk menghindari kemungkinan penularan kepada orang-orang di sekitar anda termasuk keluarga.**

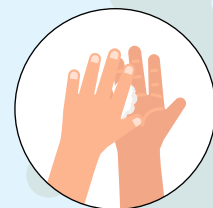
Melaporkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat tentang kondisi kesehatannya, riwayat kontak dengan pasien COVID-19 atau riwayat perjalanan dari negara/area transmisi lokal, untuk dilakukan pemeriksaan sampel oleh petugas kesehatan.



Gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain.

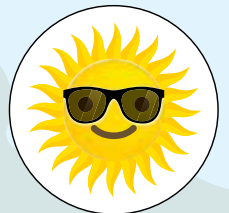


Gunakan masker dan lakukan pengukuran suhu harian serta observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas.



Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengonsumsi makanan bergizi, melakukan kebersihan tangan rutin, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta keringkan, lakukan etika batuk/bersin.

Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi dan menjaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan.



Hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas), dan perlengkapan mandi (handuk, sikat gigi, gayung), dan linen/seprai.



Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit memburuk (seperti sesak nafas) untuk dirawat lebih lanjut. Hubungi Hotline Center Corona untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di nomor 119 ext 9.



# Tetap Bekerja di Tengah Pandemi Korona

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhitung sejak Selasa (17/3), menerapkan pola kerja *work from home* (WFH). Hal ini sebagai respons terhadap anjuran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya pencegahan penyebaran korona (Covid-19). Kebijakan ini berlaku di kantor BPK dan seluruh perwakilan di Indonesia.

Pemberlakuan WFH dipandang akan mampu meminimalkan pertemuan fisik antar pegawai. Hal ini karena WFH diberlakukan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi kerja jarak jauh.

Sejak pandemi menyebar, BPK telah merespons dengan mengeluarkan ketentuan WFH melalui Surat Edaran Nomor 05/SE/X-XIII.2/3/2020 tentang Mekanisme Penyelesaian Tugas Kedinasan dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pelaksana BPK.

Penerapan kebijakan ini juga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus

Korona di Indonesia.

Surat edaran ini memberikan acuan bagi pegawai BPK dalam menyelesaikan tugas kedinasan di tengah penyebaran korona sebagai upaya pencegahan di lingkungan BPK. Pelaksanaan WFH dan aturan teknisnya juga disiapkan oleh sekretariat jenderal dan satuan kerja di BPK.

Selama WFH, pegawai tidak diperbolehkan meninggalkan rumah atau domisili yang saat ini ditinggali. Kecuali untuk kepentingan mendesak atau darurat. Itu pun setelah mendapat persetujuan atasan langsung.

Begitu pun untuk melakukan pekerjaan di kantor. Hal itu hanya dapat dilakukan jika menjalankan pekerjaan yang penting dan/atau mendesak dan harus dilaksanakan di kantor. Hal ini juga wajib mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan dilaporkan kepada sekretariat jenderal.

Ada aturan khusus untuk pegawai yang bertugas menangani pengamanan dan pemeliharaan kantor serta kesehatan melaksanakan tugas kedinasan. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan dan pengaturan pimpinan satuan kerja. Pegawai yang mendapatkan penugasan untuk bekerja di kantor juga diwajibkan menggunakan alat transportasi pribadi atau alat transportasi umum non-massal.

## Sekjen BPK Bahtiar Arif



### Kebijakan apa saja yang ditempuh menghadapi situasi yang ada?

Di lingkungan kantor pusat dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penyemprotan cairan disinfektan kepada seluruh pegawai dan tamu yang mendatangi kantor pusat di Jakarta. Bahkan tidak hanya kepada pegawai dan tamu, kendaraan yang digunakan juga disemprot dengan cairan disinfektan.

Penyemprotan disinfektan ini sebagai langkah preventif penyebaran virus corona Covid-19 melalui proses sterilisasi.

Penyemprotan yang dikoordinasi oleh Biro Umum untuk memastikan tidak adanya Covid-19. Sehingga dapat menjamin rasa aman dan nyaman saat

seluruh pegawai BPK sudah mulai bertugas kembali.

### Bagaimana mensinergikan seluruh kegiatan BPK pada masa pandemi seperti saat ini?

Berdasarkan surat Edaran Nomor 05/SE/X-XIII.2/3/2020 tentang Mekanisme Penyelesaian Tugas Kedinasan dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pelaksana BPK, seluruh pegawai di lingkungan pelaksana BPK melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*). Selain itu juga tetap berkomunikasi memanfaatkan teknologi jarak jauh yang dikembangkan BPK.

Pejabat pimpinan tinggi madya/pr-

## Agung Firman Sampurna Ketua BPK

### Bagaimana BPK menyikapi situasi pandemi yang kita hadapi saat ini?

BPK langsung mengambil langkah kebijakan *work from home* yang berguna meminimalkan pertemuan fisik, sehingga menerapkan kerja dari rumah per Selasa, 17 Maret 2019.

### Kebijakan apa saja yang ditempuh menghadapi situasi yang ada?

Kebijakan paling pertama yang diambil adalah bekerja dari rumah begitu juga dengan kegiatan pemeriksaan. Ketentuan dan mekanisme bekerja dari rumah selanjutnya diatur melalui surat edaran sekjen dan memanfaatkan fasilitas teknologi kerja jarak jauh yang dimiliki BPK.

Ketentuannya diatur melalui Surat Edaran Nomor 05/SE/X-XIII.2/3/2020 tentang Mekanisme Penyelesaian Tugas Kedinasan dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan pelaksana BPK.

Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penyemprotan cairan disinfektan kepada seluruh pegawai dan tamu yang mendatangi kantor pusat BPK di Jakarta. Hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab instansi untuk melindungi para pelaksana BPK

### Bagaimana skenario yang disiapkan BPK jika keadaan belum membaik dalam waktu dekat?

tama dengan dibantu pejabat administrator dan/atau pejabat pengawas melakukan pembagian tugas bagi pegawai di bawahnya dalam bentuk penugasan berupa surat tugas (tanpa konsekuensi keuangan) untuk bekerja dari rumah.

Atasan langsung juga wajib memantau dan melaporkan penugasan secara berjenjang kepada pimpinan satuan kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama untuk satuan kerja di kantor perwakilan dan pejabat pimpinan tinggi madya untuk satuan kerja di kantor pusat pada setiap akhir pekan.

Sementara pegawai wajib melapor secara formal maupun informal jika yang bersangkutan dan/atau anggota keluarga pegawai diduga/diawasi/terkonfirmasi

positif terjangkit Covid-19 kepada atasan langsung dan surel: *tanggap.corona@bpk.go.id*.

Kemudian atasan langsung segera melaporkan baik secara formal maupun informal kepada pimpinan masing-masing dan sekretaris jenderal dengan tembusan surel: *tanggap.corona@bpk.go.id* jika ditemukan adanya pegawai/pihak lain di lingkungan kerja yang diduga/diawasi/terkonfirmasi positif terjangkit Covid-19 dan melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 3/SE/X-XIII.2/3/2020.

### Apa rencana yang akan dijalankan BPK ke depannya jika situasi belum membaik dalam waktu dekat?



BPK saat ini memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan kebijakan pegawai di lingkungan BPK bekerja dari rumah hingga 14 April 2020. Kebijakan ini merupakan respons perpanjangan pemberlakuan masa keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 di Indonesia. ●

BPK sudah memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan kebijakan WFH hingga 14 April 2020. Selama masa keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit, saya juga meminta pegawai tetap berada di domisili saat ini per 29 Maret 2020 untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19.

Selama perpanjangan masa WFH, mekanisme kerja pegawai tetap memanfaatkan fasilitas teknologi kerja jarak jauh yang dimiliki BPK. Ini demi menjaga kesehatan serta meminimalkan risiko penularan Covid-19 pada para pelaksana BPK. Selain itu, memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPK tetap berjalan baik di tengah keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit. ●

## Auditor Utama KN VI Dori Santosa

**Pemeriksa merupakan beberapa dari bagian BPK yang tetap harus melaksanakan pekerjaan di kantor. Apa antisipasi yang disiapkan untuk menjaga agar mereka yang memang masuk ke kantor tidak terjangkit Covid-19?**

Memang betul pemeriksaan adalah tugas utama BPK dalam melaksanakan amanat undang-undang tentang BPK dan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Akan tetapi, dalam mengantisipasi adanya wabah Covid-19, BPK telah melakukan WFH, yaitu kerja dari rumah. Ini juga termasuk kebijakan pemerintah pusat. Para pemeriksa tidak diperkenankan kerja di kantor kecuali ada hal yang sangat penting dan darurat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kontak dengan orang lain sehingga dapat memutus rantai penularan Covid-19.



**Apakah ada perubahan jadwal atau target penyelesaian pekerjaan terkait adanya pandemi ini? Apa antisipasi yang dijalankan terkait hal itu?**

Para auditor dapat bekerja dari rumah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Baik dengan *video conference* maupun fasilitas teknologi lainnya. Dengan kejadian sekarang ini tentu akan mempengaruhi pola kerja dan prosedur audit yang harus di-



Para pemeriksa tidak diperkenankan kerja di kantor kecuali ada hal yang sangat penting dan darurat.

lakukan dan tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Ini juga akan dapat mempengaruhi target dan waktu yang sudah ditentukan. Tetapi dengan prosedur alternatif yang dilakukan, saya yakin target ini akan tetap tercapai.

**Apakah ada kendala dalam bekerja selama masa WFH ini?**

Memang ada beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah dokumen tidak dapat segera didapat karena entitas juga melakukan WFH. Selain itu, pemeriksa tidak dapat melakukan cek fisik. ●



Biro Keuangan masih melakukan analisis lebih lanjut mengenai dampak pandemi korona ini terhadap kinerja anggaran BPK TA 2020.



## Kepala Biro Keuangan Edy Susila

**Apa dampak korona terhadap anggaran dan keuangan BPK?**

Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk menerbitkan beberapa kebijakan dalam rangka mencegah penyebaran virus ini dan mencegah kondisi menjadi lebih buruk. Kebijakan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung akan membawa dampak terhadap realisasi anggaran dan kinerja implementasi anggaran BPK pada TA 2020.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, ketua BPK melalui siaran

## Kepala Biro Umum Sudarminto Eko Putra

### **Biro Umum merupakan salah satu bagian yang tetap harus masuk selama penerapan WFH. Bagaimana pembagian dan prosedur pelaksanaannya?**

Pembagian yang masuk dilakukan melalui *shift*, baik itu di bagian pengamanan, pemeliharaan rumah dinas dan kantor, serta penyiapan sarana dan prasarana kantor. Prosedur pelaksanaannya tetap mengikuti intruksi kerja yang telah ditetapkan oleh satuan kerja Biro Umum. Baik itu di bagian pengamanan, pemeliharaan rumah dinas dan kantor, serta sarana dan prasarana kantor.

Saat ini antisipasi yang disiapkan untuk menjaga yang masuk kantor supaya tidak terjangkit penyakit Covid-19 yaitu melalui sterilisasi orang dan kendaraan yang telah disediakan oleh Biro Umum. Untuk orang, yaitu melalui pengukuran suhu badan dan menggunakan *hand sanitizer*. Sedangkan kendaraan kami sterilisasi dengan menggunakan disinfektan.

### **Bagaimana memberikan motivasi dan**



### **semangat kepada mereka yang harus masuk selama masa WFH ini?**

Selain memberikan motivasi bahwa kita bekerja untuk dan atas nama BPK, kami juga menyediakan makan dengan membuka dapur umum. Kami juga melakukan pemberian vitamin C dan E kepada yang masuk ke kantor.

### **Apakah ada kendala dalam bekerja selama masa WFH ini?**

Selama bekerja dalam masa WFH ini menurut pandangan saya belum ada kendala yang berarti. ●



Saat ini antisipasi yang disiapkan untuk menjaga yang masuk kantor supaya tidak terjangkit penyakit Covid-19 yaitu melalui sterilisasi orang dan kendaraan yang telah disediakan oleh Biro Umum.

pers BPK pada 16 Maret 2020 menyatakan bahwa perlu ada kebijakan WFH guna meminimalkan pertemuan fisik selama 14 hari ke depan, termasuk untuk kegiatan pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan di tempat entitas yang diperiksa dihentikan sementara sampai 31 Maret 2020. Pemeriksa bekerja dari rumah sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pejabat pemberi tugas. Kondisi tersebut menjadi pemicu beberapa risiko. Mulai dari potensi keterlambatan dalam penyelesaian dan penyampaian LHP, realisasi anggaran lebih rendah dari rencana yang ditetapkan dalam RKP dan RKA/POK Satker, dan kemungkinan memengaruhi kualitas laporan hasil pemeriksaan.

Selain terhadap kegiatan pemeriksaan, WFH juga berdampak terhadap

seluruh kegiatan yang berkaitan dengan unsur kesetjeraan dan penunjang. Meliputi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kehumasan dan kerja sama internasional, teknologi informasi, sekretariat pimpinan, dan umum. Serta aktivitas penunjang seperti pendidikan dan pelatihan, perencanaan, penelitian, evaluasi, hukum, dan pengawasan.

### **Apakah pandemi korona ini memengaruhi kinerja anggaran BPK secara jangka panjang?**

Kegagalan pencapaian target realisasi anggaran secara langsung kemudian akan berdampak pada nilai kinerja anggaran BPK. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017.

Nilai kinerja yang akan terpengaruh adalah pada tingkat pertama yaitu kinerja anggaran tingkat satuan kerja/kegiatan dengan evaluasi kinerja atas aspek implementasi (EKA). Empat indikator kinerja tingkat implementasi terdiri atas: penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan nilai efisiensi.

Lebih detail, dua indikator yang terdampak langsung adalah penyerapan anggaran serta konsistensi antara perencanaan dan implementasi. Namun BPK berkomitmen terhadap pencapaian keluaran yang telah ditargetkan dalam RKA-BPK TA 2020. Sehingga diharapkan terus memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

Biro Keuangan masih melakukan analisis lebih lanjut mengenai dampak

pandemi korona ini terhadap kinerja anggaran BPK TA 2020. Diharapkan hasil analisis akan terbit paling lambat pada pekan kedua April 2020.

#### **Apa tantangan dan strategi BPK ke depan setelah melihat situasi yang berkembang saat ini?**

Kami mengambil langkah strategis berdasarkan dampak yang dapat diidentifikasi. Ini sebagai langkah strategis guna mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Satker di BPK disarankan untuk mempertimbangkan beberapa saran.

Misalnya, mengutamakan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19. Karenanya diperlukan sinergi antarsatker di kantor pusat maupun perwakilan dalam mempercepat penanganan. Mulai dari pemenuhan ketersediaan peralatan seperti disinfektan dan *thermogun* dengan jumlah yang ideal untuk seluruh ruang kerja BPK RI untuk Biro Umum.

Kemudian pemenuhan ketersediaan obat-obatan yang dapat meningkatkan imunitas pegawai untuk Biro Umum. Lalu pemenuhan layanan teknologi agar pelaksanaan kerja dari rumah dapat berjalan lancar untuk Biro TI, dan sebagainya. Hal ini juga dilakukan pada satker-satker Badiklat, BPK Perwakilan, Balai Diklat, dan museum oleh unit kerja masing-masing secara serempak.

Potensi kegagalan dalam pencapaian target realisasi semester I juga harus disikapi lebih lanjut oleh para pimpinan satker pemeriksaan. Pimpinan satker diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai skenario serta skala prioritas menghadapi ketidakpastian sebagai dampak pandemi Covid-19 terhadap pemeriksaan.

Ini dilakukan dengan identifikasi detail biaya yang tidak terealisasi dibandingkan RKP yang telah disusun, menyusun langkah-langkah strategis dan efektif dalam pencapaian kinerja pemeriksaan, menyesuaikan kembali jadwal kegiatan prioritas yang terganggu. Kemudian, jika ada sisa anggaran kegiatan pemeriksaan, pimpinan satker dapat segera mengusulkan penambahan hasil target volume keluaran atau peningkatan kualitas hasil pemeriksaan berupa penambahan *mandays* pemeriksaan kinerja dan DTT dengan mempertimbangan sumber daya yang tersedia.

Pimpinan satker juga diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai skenario serta skala prioritas menghadapi ketidakpastian. Ini sebagai dampak pandemi Covid-19 terhadap kegiatan kesetjanaan dan penunjang. Hal tersebut dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pemeriksaan, serta mempertahankan layanan dukungan terhadap pemeriksaan.

Antara lain dengan mengidentifikasi detail biaya yang tidak terealisasi dibandingkan RKSP/RKA/POK yang telah disusun dan menyesuaikan kembali jadwal kegiatan prioritas yang terganggu, antara lain pelaksanaan pemilihan penyedia PBJ serta pelaksanaan diklat yang bersumber dari PNBP. ●

## Kepala Badan Diklat PKN Hery Subowo



#### **Bagaimana kesiapan Badiklat menghadapi pandemi korona?**

Selama periode WfH, setiap hari dilakukan *monitoring* kesehatan pegawai dan berkoordinasi dengan dokter Badiklat/faskes jika dibutuhkan penanganan tertentu. Karena WfH dapat mengurangi interaksi fisik antarpegawai, maka penyelesaian seluruh pekerjaan kepada pihak internal maupun eksternal dilakukan melalui media *online*, seperti *e-mail*, *Whatsapp*, *SMS*, dan telepon. Rapat koordinasi pun dilakukan menggunakan aplikasi *Zoom* dan *webinar*.

Akses keluar masuk kompleks Badiklat juga dibatasi dan harus mengikuti protokol pencegahan Covid-19 yang diberlakukan di Badiklat, yaitu diukur suhu tubuh, cuci tangan dengan *hand sanitizer*, dan lain-lain. Kendaraan yang keluar masuk dilakukan penyemprotan disinfektan dan dilakukan dua kali proses disinfeksi untuk seluruh ruangan dan area Badiklat.

Seluruh kegiatan renovasi dihentikan agar area Badiklat tetap steril. Namun untuk memastikan keamanan dan kebersihan kantor tetap terjaga, ada petugas yang dijadwalkan piket sehingga tetap harus masuk meskipun tidak lebih dari 10 orang per hari. Mereka mencakup petugas pengamanan, pengelola wisma, dan kebersihan. Seluruhnya juga diharuskan tinggal di wisma Badiklat untuk





Untuk memastikan kegiatan diklat tetap berlangsung selama pemberlakuan tanggap darurat Covid-19, Badiklat tengah merancang pelaksanaan diklat yang berbasis *e-learning* untuk ditawarkan pada pegawai BPK pada April ini. Materi diklat yang akan dilakukan secara *e-learning* meliputi “Work Life Balance, Project Management,” dan “Performance Audit.”

mengurangi mobilitas orang pulang pergi ke rumah dan kantor.

Sebagai wujud solidaritas, keluarga besar Badiklat juga tengah menggalang dana bantuan (donasi) sembako untuk masyarakat sekitar Badiklat dan Balai yang terkena dampak Covid-19.

#### **Bagaimana kebijakan penerapan belajar/diklat pada masa ini?**

Terkait kegiatan diklat selama masa pandemi Covid-19 ini, seluruh kegiatan seperti diklat teknis, diklat terakreditasi, dan diklat eksternal, ditunda. Bahkan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Balai Diklat Yogyakarta yang baru saja dibuka pada awal pemberlakuan WFH dihentikan sementara dan peserta dipulangkan ke satker masing-masing.

Kegiatan WFH di Badiklat saat ini fokus untuk menyiapkan kurikulum, silabus, dan bahan ajar untuk diklat JFP Ahli Pertama CPNS. Kemudian merancang kerja sama kediklatan dengan lemdiklat lain dalam menyiapkan kurikulum silabus dan bahan ajar mata diklat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara pada sekolah, kursus, dan diklat kepemimpinan ASN, TNI dan Polri dalam rangka mendukung program “Accountability for All”.

Untuk memastikan kegiatan diklat tetap berlangsung selama pemberlakuan tanggap darurat Covid-19, Badiklat tengah merancang pelaksanaan diklat yang berbasis *e-learning* untuk ditawarkan pada pegawai BPK pada April ini. Materi diklat yang akan dilakukan secara *e-learning* meliputi “Work Life Balance, Project Management,” dan “Performance Audit.”

#### **Apakah ada kurikulum khusus yang dibuat untuk menghadapi situasi seperti saat ini?**

Pelaksanaan tiga macam diklat yang tadi saya sebutkan merupakan salah satu prototipe pelaksanaan *e-learning* yang akan terus dikembangkan Badiklat ke depan. Badiklat kini telah memiliki mekanisme diklat *e-learning* yang dilengkapi juga dengan panduan

penggunaan portal, *frequently asked question*, mekanisme pendaftaran *user* yang akan mempermudah calon peserta diklat. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua mata diklat dapat dilaksanakan secara *full e-learning*. Terutama untuk diklat teknis pemeriksaan yang memerlukan diskusi dan praktik di kelas yang lebih mendalam. Untuk itu Badiklat telah menyiapkan empat pola penerapan *blended learning*, yaitu gabungan antara penerapan *e-learning* dan pendekatan konvensional tatap muka.

Untuk mata diklat yang dapat dilaksanakan secara *e-learning*, Badiklat sudah menyiapkan materi yang terkait *softskill*. Ada sekitar 80 modul pelatihan yang sudah kami adakan.

Modul tersebut antara lain *coaching and mentoring, emotional intelligent, change management, communication strategies, creative problem solving*, dan sebagainya. Melalui penerapan *e-learning* dan *blended learning*, Badiklat tetap berupaya mengembangkan kompetensi pegawai BPK dan pihak eksternal dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengatasi keterbatasan ruang kelas dan kamar wisma, keterbatasan anggaran diklat, dan padatnya kegiatan tusi audit dan nonaudit.

Penerapan *e-learning* dan *blended learning* ini juga dapat menjadi salah satu alternatif penyelenggaraan diklat pada masa pembatasan sosial berskala besar akibat bencana pandemik seperti saat ini. Atau jika terjadi darurat lainnya yang menghalangi proses pembelajaran secara konvensional di ruang kelas. Apalagi kecenderungan global saat ini juga mengarah kepada penyelenggaraan MOOCs (*massive open online courses*). Pola ini dapat diikuti lebih banyak peserta dari berbagai belahan dunia dengan waktu yang lebih fleksibel tanpa terlalu mengganggu ritme pekerjaan di kantor masing-masing.

Jadi intinya, menghadapi situasi seperti saat ini Badiklat akan memperkuat penerapan *e-learning* dengan kurikulum topik yang berfokus pada penguatan *softskill* pegawai. ●

# Melanjutkan Insting Bisnis Suvenir



■ Contoh produk suvenir Dedy



Salah satu hal yang membuat Dedy mudah mendapatkan konsumen adalah sikapnya yang proaktif dalam menawarkan produk.

Insting berdagang yang ada dalam diri Dedy terasa sulit dibendung. Meski sudah bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dedy yang kini menjabat Pengawas dan Pengendali Mutu Internal Inspektorat Utama BPK tetap menyalurkan bakatnya dengan berbisnis penyediaan suvenir di internal BPK.

Dengan jaringan yang luas dan kemampuan memberikan produk berkualitas tinggi, Dedy bisa membukukan omzet penjualan mencapai Rp500 juta per tahun. Sebelum bekerja di BPK, Dedy sempat bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan suvenir. Awalnya, Dedy bekerja di bagian keuangan dan akuntansi di perusahaan tersebut.

Namun, hanya berselang enam bulan, Dedy dipercaya menjabat posisi *general manager*. "Dari sana, akhirnya saya juga memegang bidang operasional sehingga saya mengetahui semua proses produksi," kata Dedy kepada *Warta Pemeriksa*.

Dedy mempelajari proses produksi mulai dari membeli bahan baku, mendesain pro-

duk, hingga penjualan ke konsumen. Dedy bekerja di perusahaan tersebut sejak 2009. Seiring berjalannya waktu, Dedy menemukan titik jenuh dalam pekerjaannya. Hal itu dirasakan karena tekanan pekerjaan yang menyita waktunya. "Setiap hari saya berikan kepada perusahaan. Meskipun gaji saya berkecukupan, tapi tidak ke mana-mana juga dan saya tidak punya waktu untuk menikmatinya," kata Dedy.

Dedy kemudian mendengar informasi lowongan pekerjaan di BPK dari kerabatnya. Dia sempat berkonsultasi dengan psikolog untuk memantapkan pilihannya masuk ke BPK. Ketika itu, dia diyakinkan bahwa bekerja di BPK akan memberikan tantangan yang lebih besar namun dapat memberikan peran yang lebih besar untuk kemajuan negara. "Saya berpikir mungkin jalan saya memang di BPK. Saya menyatakan *resign* dan saya bergabung dengan BPK pada 2011," kata Dedy.

Setelah bergabung dengan BPK, Dedy mengaku tak bisa membendung keinginannya berbisnis. Meski begitu, ia juga menyadari tak sepenuhnya bisa menjalankan bisnis pribadi. Dedy mengatakan, terdapat kode etik tentang pegawai yang melakukan usaha. Terlebih lagi, BPK adalah lembaga yang harus menjaga jarak dengan berbagai lembaga lain yang menjadi entitas audit.

Dedy pun memilih membatasi bisnisnya

”

Bagi saya ada rasa kepuasan tersendiri dan merasa bahwa produk kita laku. Bukan dilihat dari nilai keuntungan tapi dari kepuasan tersendiri.



■ Dedy

khusus di internal BPK. Dia mengaku, terdorong berbisnis untuk membantu konsumennya mendapatkan produk dengan kualitas tinggi dan harga terjangkau. Dedy mengatakan, dari rata-rata transaksi yang diterima, ia hanya mengambil keuntungan sebesar lima persen dari total penjualan. "Bagi saya ada rasa kepuasan tersendiri dan merasa bahwa produk kita laku. Bukan dilihat dari nilai keuntungan tapi dari kepuasan tersendiri," kata Dedy.

Menurut Dedy, salah satu hal yang membuatnya mudah mendapatkan konsumen adalah sikapnya yang proaktif dalam menawarkan produk. Dia kerap kali menawarkan beberapa ide desain produk souvenir kepada konsumennya.

Hal ini berbeda dengan pelaku usaha serupa yang cenderung menunggu bola dan mengerjakan pesanan konsumen. Bahkan, kata Dedy, dirinya juga bisa menyesuaikan produk dengan anggaran yang dimiliki konsumen. "Jadi seandainya klien hanya bisa menganggarkan Rp50 ribu untuk satu tas, saya bisa usahakan bahan bakunya tetap bagus tapi ada kantung atau spesifikasi lain yang dikurangi. Ini supaya bisa mencapai *budget* yang sesuai," ujarnya.

Saat ini Dedy mengaku fokus hanya

menjual produk souvenir berupa *goodie bag*. Untuk modal usaha, dia mengatakan kerap harus merogoh kocek sendiri untuk membeli tas sebagai sampel. "Persoalannya terkadang ada pesanan tas *backpack* yang satu buahnya mencapai Rp1 juta. Itu saya harus beli untuk contoh," kata Dedy.

Dedy mengatakan, dalam perjalanan bisnisnya, ia juga pernah mengecewakan klien. Ketika itu, Dedy mendapatkan pesanan berupa *goodie bag*, tas ransel, dan tas selempang sekaligus. Kala itu, Dedy mencoba berpindah ke penjahit baru karena menurutnya semua penjahit memiliki kualitas yang serupa. "Setelah barang datang itu untuk pertama kalinya saya *diomelin*. Karena *quality control*-nya jelek barang yang datang itu jahitannya lepas semua," kata Dedy.

Dedy pun memutuskan untuk menarik semua barang itu dan mengerjakan ulang. Sejak saat itu, dia mengaku tak mau berspekulasi dan memilih mempercayakan produksi pada mitra kerjanya yang sudah terpercaya. "Jadi kuncinya, saya memilih menggunakan penjahit yang memang lebih mahal dengan ketelitian lebih tinggi dibandingkan penjahit dengan biaya murah tapi hasil produk tak berkualitas," kata Dedy. ●



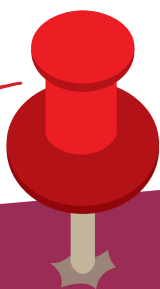
■ Contoh produk souvenir Dedy



■ Contoh produk souvenir Dedy



# Kuis



## Pertanyaan:

Dalam Majalah Warta Pemeriksa Edisi Februari 2020 Ketua BPK menyebutkan salah satu formulasi independensi anggaran yang diajukan, apakah itu?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email [wartabpkri@gmail.com](mailto:wartabpkri@gmail.com) dengan subjek '**Kuis**'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.

# Mengatasi Masalah dengan *Self Healing*

Masalah yang disampaikan klien kepada psikolog juga terjaga kerahasiaannya.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, amat merasakan manfaat hadirnya Employee Care Center (ECC). Salah satunya terkait upaya mengatasi masalah psikologi pegawai secara *self healing*.

“Sejauh ini cukup signifikan manfaat dari keberadaan ECC. Karena dengan hadirnya psikolog ECC di

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa masalah pegawai dapat teratasi secara profesional. Selain itu psikoedukasi yang diberikan oleh psikolog juga berdampak pada kemampuan pegawai dalam melakukan *self healing*,” ucap Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Wahyu Priyono kepada *Warta Pemeriksa*, beberapa waktu lalu.

Wahyu menceritakan, layanan konseling ECC pertama kali hadir pada 20 September 2018. Ketika itu layanan yang diberikan berupa konseling dan intervensi psikologi berupa psikoterapi (jika dibutuhkan).

”

Dengan hadirnya psikolog ECC di BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, beberapa masalah pegawai dapat teratasi secara profesional.



■ Wahyu Priyono



Layanan ini diperuntukkan kepada pegawai dengan wilayah kerja Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Balai Diklat Gowa.

Kehadiran layanan konseling ECC pun disambut antusias pegawai perwakilan Kalsel. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya pegawai yang mendaftar untuk melakukan konseling di ECC BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Rata-rata, ucap dia, topik permasalahan yang disampaikan oleh pegawai yakni terkait masalah pekerjaan. Mulai dari *burn out*, masalah pernikahan dan keluarga besar, serta pengasuhan anak normal serta anak berkebutuhan khusus.

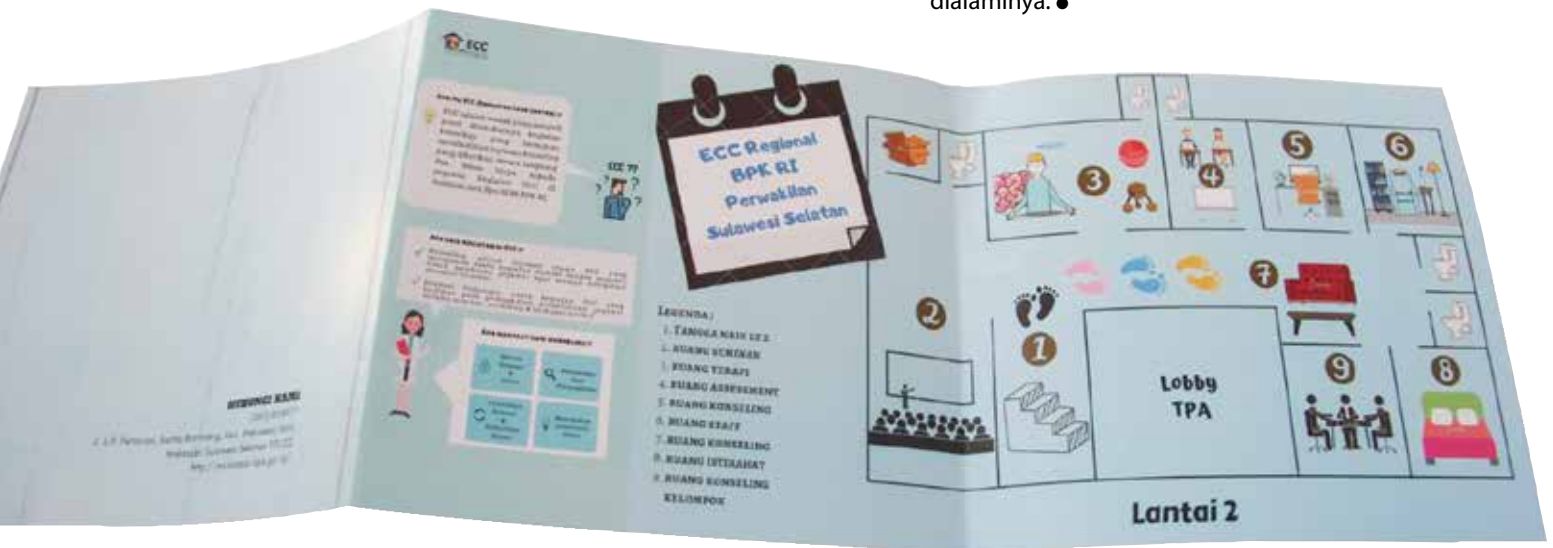
ECC juga menghadirkan psikolog eksternal untuk memberikan layanan konseling, intervensi psikologi, psikoedukasi dalam bentuk seminar, dan *sharing session*. "Selama ini ECC masih terbatas melayani pegawai

yang konsultasi berdasarkan inisiatif sendiri. ECC hanya memberitahukan jadwalnya saja," tambah dia.

Wahyu pun berharap pegawai dapat terus memanfaatkan layanan yang diberikan oleh ECC. Apalagi selama ini BPK Sulsel menggandeng seorang psikolog klinis yang berkompeten di bidangnya. Ini dibuktikan dengan adanya surat izin praktik psikolog klinis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat.

Memang, lanjut dia, setiap psikolog memiliki gaya atau pendekatan tersendiri dalam melakukan konseling terhadap kliennya. Akan tetapi, setiap psikolog memiliki prosedur yang sudah terstandarisasi dalam menghadapi klien dan membantu mereka memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Jadi, psikolog tidak akan bertindak sembarangan dan akan melakukan diagnosis serta tindakan sesuai dengan keilmuan yang dimiliki. Selain itu masalah yang disampaikan klien kepada psikolog juga terjaga kerahasiaannya. Sehingga klien tidak perlu merasa khawatir terhadap kerahasiaan masalah yang dialaminya. ●



# Pemanfaatan Dana Otsus Belum Optimal



Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua menemukan beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan dana otsus.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua telah melakukan pemeriksaan atas efektivitas penggunaan dana otonomi khusus (otsus) pada Pemerintah Provinsi Papua. Hasil pemeriksaan menunjukkan, pemanfaatan dana otsus belum optimal.

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Papua Paula Henry Simatupang menjelaskan, pemeriksaan dana otsus dilakukan pada 2019 di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan Maret 2019 dan pemeriksaan terinci

dilaksanakan pada April 2019. Sementara, laporan hasil pemeriksaan telah diserahkan kepada Pemprov Papua 13 Januari 2020.

Henry mengatakan, ada beberapa alasan yang mendasari BPK melakukan pemeriksaan dana otsus. Pertama, karena beberapa indikator kesejahteraan di Papua, antara lain indeks pembangunan manusia (IPM), rasio gini, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka belum optimal atau rendah dibandingkan rata-rata nasional. "Selain itu masa pengalokasian dana otsus akan segera berakhir tahun 2021," kata Henry kepada *Warta Pemeriksa*.



Alasan lainnya, kata Henry, pemeriksaan kewilayahan termasuk tema dalam Renstra BPK 2015-2019. Pemeriksaan juga dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut hasil pemeriksaan dana otsus sebelumnya. Kata Henry, BPK Papua dalam pemeriksaan sebelumnya menemukan permasalahan mengenai regulasi dan kebijakan, penyaluran dana yang tidak sesuai ketentuan, realisasi penggunaan dana tidak sesuai perencanaan, hingga hasil pekerjaan belum dimanfaatkan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atas efektivitas penggunaan dana otsus, masih ditemukan beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan dana otsus. Pertama, regulasi terkait penggunaan dana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus belum sepenuhnya memadai.

Kedua, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki struktur pengelolaan dana otsus yang memadai serta belum didukung sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi memadai. Sementara permasalahan ketiga, perencanaan dan pengalokasian anggaran penggunaan dana otsus belum seluruhnya memadai. "Lalu, pencairan dan pemanfaatan dana otsus masih belum optimal," kata Henry.

BPK telah memberikan rekomendasi perbaikan. Henry menyampaikan, beberapa rekomendasi yang disampaikan BPK adalah harus adanya penyusunan *grand desain* pembangunan dari dana otsus yang memuat target pencapaian pelaksa-

naan dana otsus. Selain itu, melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam tim yang dibentuk untuk menentukan besaran pembagian alokasi ke kabupaten/kota.

### Kualitas laporan keuangan

Terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Papua, Henry menilai semakin membaik setiap tahunnya. Berdasarkan data sejak 2014-2018, pemda yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat dari hanya empat pemda di 2014 menjadi 11 pemda di tahun 2019. Sementara, pemda yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) menurun dari 14 pemda menjadi hanya delapan pemda.

Ia mengatakan, BPK Perwakilan Provinsi Papua membantu entitas meningkatkan kualitas laporan keuangannya melalui rekomendasi hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. BPK Perwakilan Papua juga sering melaksanakan beberapa kegiatan terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Kata dia, pembahasan tindak lanjut dengan pemda digelar setiap semester. Selain itu, dilakukan kegiatan *workshop* optimalisasi penyelesaian rekomendasi BPK.

"Tahun 2020 kami sudah melaksanakan di Biak tanggal 28 Januari 2020 dan di Wamena tanggal 12 Februari 2020. Rencananya juga akan dilaksanakan di Nabire dan Mimika. Pemerintah daerah dalam beberapa kesempatan juga mengundang BPK sebagai narasumber, khususnya terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan," ungkap dia. ●



**BPK Perwakilan Provinsi Papua juga sering melaksanakan beberapa kegiatan terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.**



# JURNALISTIK

TEMA

## “Sinergi Pemeriksaan BPK Mengawal Harta Negara”

Tema khusus\*:

- Pemeriksaan BPK untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (17 Sustainable Development Goals);
- Peran Audit dalam mengurangi Korupsi;
- Pentingnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
- BPK dan Wewenang Penghitungan Kerugian Negara;
- Accountability For All untuk Indonesia yang lebih baik.

\*Background Informasi Tema Khusus: <http://bit.ly/2ZJnmbY>



### Persyaratan Lomba

- Peserta adalah wartawan dan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan kartu identitas diri;
- Peserta adalah wartawan yang bekerja di media cetak atau media online kantor berita dibuktikan dengan tanda pengenal wartawan yang dilampirkan salinannya saat mengirim karya tulis;
- Hasil karya merupakan karya orisinal yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, bukan saduran, bukan terjemahan, non-SARA, dan tidak tergolong advertorial;
- Karya jurnalistik dimuat di media cetak atau media online periode 1 Oktober 2019 – **31 Mei 2020**
- Karya bisa berbentuk opini serta bentuk pemberitaan;
- Panitia diberi hak dan wewenang untuk mempublikasikan karya jurnalistik peserta lomba dengan mencantumkan nama penulisnya;
- Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

### Kategori

Pemberitaan  
di Media Cetak atau Media Online

Opini  
di Media Cetak atau Media Online

### Batas Pengiriman

31 Mei 2020

### Hadiah Pemenang Lomba

masing-masing kategori

Juara I : Rp10.000.000

Juara II : Rp8.000.000

Juara III : Rp5.000.000



Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

### Pengiriman Karya Lomba

- Karya jurnalistik dikirimkan ke alamat email [publikasimedia@bpk.go.id](mailto:publikasimedia@bpk.go.id) atau [wartabpkri@gmail.com](mailto:wartabpkri@gmail.com) disertai dengan hasil scan KTP; scan Press ID; scan bukti pemuatan opini/berita di media cetak lengkap dengan keterangan edisi, hari, tanggal, halaman; link bukti pemuatan opini/berita di media online; scan lembar pernyataan orisinalitas karya (<http://bit.ly/39o8Xw2>); dengan subject email: **Lomba Karya Jurnalistik BPK 2020**;
- Karya diterima panitia **paling lambat pada 31 Mei 2020 pukul 15.00 WIB**. Karya lomba yang masuk setelah batas waktu yang ditentukan, dianggap gugur;
- Peserta boleh mengirimkan maksimal 2 karya untuk masing-masing kategori.

# IPKN Tingkatkan Kapasitas Profesi Pemeriksa Keuangan Negara

”

Kita terbuka untuk semua orang yang terlibat dalam keuangan negara.



■ Bahrullah Akbar, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional IPKN

IPKN ingin meningkatkan pemahaman akuntabilitas tidak hanya dari sisi pemeriksaan, tapi juga dari sisi pengelolaan tanggung jawab keuangan negara.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah meluncurkan Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN). Organisasi tersebut merupakan wadah bagi para pemeriksa keuangan negara yang dibentuk sesuai amanat undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Permenpan RB Nomor 49 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa. Permenpan RB tersebut mengatur bahwa BPK bertugas memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa” dan pembentukan organisasi profesi paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri PAN dan RB diundangkan.

“Jadi ini bukan akal-akalan. Kita memang diminta oleh undang-undang dan segera kita laksanakan itu,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional IPKN Bahrullah Akbar kepada *Warta Pemeriksa*.

Bahrullah menjelaskan, tujuan pembentukan IPKN untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dari sisi pemeriksaan eksternal keuangan negara. Bahrullah menyampaikan, IPKN akan menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak yang terkait dengan pemeriksaan keuangan negara.

IPKN terbuka terhadap semua unsur baik dari pemerintah maupun organisasi profesi lainnya. Bahkan, ujar Bahrullah, IPKN juga akan melibatkan berbagai lembaga pendidikan untuk kemajuan pemeriksaan keuangan negara.

“Ini sesuai amanat Ketua BPK (Agung Firman Sampurna), *accountability for all*. Kita terbuka untuk semua orang yang terlibat dalam keuangan negara,” kata Bahrullah.



■ Bahrullah Akbar saat ditetapkan sebagai Ketua IPKN.

Bahrullah yang juga Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK turut mengapresiasi dukungan dari unsur pemerintah ketika IPKN diluncurkan Februari lalu. Dalam peresmian yang digelar di kantor pusat BPK, turut hadir pimpinan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, hal ini merupakan langkah yang positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia.

“Kita ingin meningkatkan pemahaman akuntabilitas tidak hanya dari sisi pemeriksaan tapi juga dari sisi pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Ini bukan kerja BPK sendiri tapi kerja kita semua,” ujar Bahrullah.

Salah satu produk yang dihasilkan IPKN adalah sertifikasi pemeriksa keuangan negara dengan gelar Certified State Finance Auditor (CSFA). Bahrullah menekankan, selain sebagai amanat undang-undang, upaya ini juga terobosan pertama yang dilakukan sebuah *supreme audit institution* (SAI) di dunia.

Menurut Bahrullah, hal ini juga akan menunjukkan kualitas BPK kepada berbagai lembaga internasional. Dia menyatakan, BPK ke depannya juga akan memberikan *recognition* atau pengakuan berupa gelar CSFA kepada mitra-mitra BPK yang ada di seluruh dunia.

Wakil Ketua Umum IPKN Hery Subowo mengatakan, organisasi IPKN terdiri atas beberapa komite, yakni Komite Pengembangan Profesi, Komite Standard dan Etika, dan Komite Kerja Sama dan Edukasi. Kemudian, terdapat koordinator wilayah yang terbagi atas wilayah pusat, timur, tengah, dan barat.

Hery menjelaskan, wilayah barat terdiri atas Sumatera, Banten, dan Jawa Barat. Kemudian, wilayah tengah yakni Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Sulawesi, Maluku, dan Papua termasuk dalam koordinasi wilayah timur.

Ketua wilayah tersebut secara *ex-officio* merupakan kepala perwakilan BPK yang kemudian akan membentuk peng-



■ Hery Subowo (kanan) dan Gunarwanto

urus wilayah. Kemudian, pengurus wilayah tersebut akan menjalankan tugas untuk menggandeng perwakilan BPKP, inspektorat provinsi dan kabupaten/kota, kantor akuntan publik (KAP), maupun organisasi profesi yang memiliki kaitan dengan pemeriksaan keuangan negara.

Sementara, koordinator wilayah pusat akan bertanggung jawab atas pengembangan IPKN ke inspektorat jenderal kementerian/lembaga (K/L), badan usaha milik negara (BUMN), dan badan layanan umum (BLU).

Dalam pemberian sertifikasi CSFA, Hery mengatakan, terdapat dua jenis sertifikasi. Yang pertama, ujanya, berupa *recognition* atau pengakuan kepada tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan pemeriksaan keuangan negara. “Oleh karena itu, kita akan memberikan *recognition* kepada aparat penegak hukum seperti salah satunya KPK,” kata Hery.

Selain itu, terdapat pula sertifikasi reguler. Seperti halnya sertifikasi profesi lain, hal itu perlu dibuktikan dengan proses pendidikan dan pelatihan (diklat) dan ujian. Terdapat 18 mata diklat yang perlu ditempuh seseorang untuk bisa mendapatkan gelar CSFA. ●

## SUSUNAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IPKN

Ketua Umum	: Bahrullah Akbar
Wakil Ketua Umum	: Hery Subowo
Sekretaris Jenderal	: Gunarwanto
Ketua Komite Pengembangan Profesi	: Ahmad Adib Susilo
Ketua Komite Standard dan Etika	: Dwi Setiawan
Ketua Komite Kerja Sama dan Edukasi	: Rio Tirta
Koordinator Wilayah Pusat	: Emmy Mutiarini
Koordinator Wilayah Timur	: Paula Henry Simatupang
Koordinator Wilayah Barat	: Yuan Candra Djaisin
Koordinator Wilayah Tengah	: Ade Iwan Ruswana
Bendahara	: Firdaus Amyar



■ Agung Firman Sampurna, Ketua BPK

# ‘Revaluasi Aset Jadi Catatan yang Perlu Diperhatikan’

Pemeriksaan LKPP merupakan pemeriksaan *mandatory* yang harus dilakukan setiap tahun dan akan melibatkan pemeriksa dari Auditorat Keuangan Negara I sampai VII.

**R**evaluasi aset menjadi catatan yang perlu diperhatikan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna dalam penyampaian LKPP Tahun 2019 *unaudited* oleh pemerintah untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Penyerahan LKPP *unaudited* dan *entrymeeting* pemer-

iksaan LKPP Tahun 2019 diadakan pada Jumat (27/3) melalui *video conference*.

Pemeriksaan LKPP merupakan pemeriksaan *mandatory* yang harus dilakukan setiap tahun dan akan melibatkan pemeriksa dari Auditorat Keuangan Negara I sampai VII. Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini membuat BPK mengambil langkah responsif dan antisipatif. Antara lain menggelar rapat dengan cara *video conference*.

BPK juga menerapkan kebijakan *work from home* dan lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi serta media komunikasi untuk mendukung proses pemeriksaan. Meskipun baik pemerintah dan BPK berupaya untuk melaksanakan agenda pemeriksaan sesuai jadwal, namun dengan kondisi saat ini akan ada ruang perubahan dalam tenggat waktu pemeriksaan.

*Entry meeting* pemeriksaan dan penyerahan LKPP Tahun 2019 *unaudited* ini dipimpin oleh Ketua BPK dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai wakil pemerintah. Diikuti juga oleh wakil ketua BPK, para anggota/pimpinan pemeriksaan keuangan negara BPK, serta pimpinan Kementerian/lembaga signifikan.

Termasuk juga kepala BPKP, pejabat lain yang terkait, pejabat eselon I BPK, pejabat pelaksana BPK, serta penanggung jawab pemeriksaan LKPP dan LKKL Tahun 2019. Pada kesempatan ini, Anggota II Pius Lustrilang juga menyampaikan sambutan *entry meeting* sekaligus beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian menteri dan pimpinan lembaga.

LKPP Tahun 2019 merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Meskipun masih terdapat catatan dalam penyajian LKPP, namun Ketua BPK mengapresiasi pemerintah yang telah menyelesaikan dan menyampaikan LKPP Tahun 2019 *unaudited* dengan tepat waktu.

Apresiasi juga diberikan kepada seluruh menteri/pimpinan lembaga yang telah menyampaikan LKKL Tahun 2019 *unaudited* kepada Menteri Keuangan secara tepat waktu. Namun selain tepat waktu, Ketua BPK juga menyampaikan bahwa materi LKPP seharusnya telah memasukkan seluruh komponen penting yang disajikan dalam laporan keuangan. Seperti hasil penilaian kembali barang milik negara (revaluasi aset).

Dalam *entry meeting* juga dilakukan diskusi tentang revaluasi aset sebagai faktor signifikan dalam peningkatan total aset tetap pemerintah per 31 Desember 2019. Yaitu menjadi Rp6.007,69 triliun dari



Rp1.931,05 triliun per 31 Desember 2018 sebagaimana dilaporkan dalam LKPP 2019 *unaudited*. Aset tetap yang direvaluasi mengalami kenaikan nilai wajar sebesar Rp4.141,59 triliun dari nilai buku sebelum revaluasi sebesar Rp1.538,18 triliun.

Pada kesempatan itu, Ketua BPK juga mengungkapkan masih ada kelemahan dalam penyajian LKPP yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Di antaranya terkait dengan revaluasi aset. Dalam rangka memberikan informasi yang lebih utuh mengenai tata kelola keuangan negara, dalam hasil pemeriksaan LKPP tahun ini juga akan dilengkapi dengan tambahan dua suplemen.

Pertama, adalah revaluasi atas desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah. Kedua, adalah revaluasi kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) untuk mengukur tingkat ketahanan dan keberlangsungan (*going concern*) atas tata kelola fiskal.

Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan menyebutkan komponen LKPP Tahun 2019 terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menteri Keuangan juga mengucapkan terima kasih kepada BPK karena telah mendorong pemerintah untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan negara dengan baik. ■

Penyampaian LKPP *unaudited* melalui *video conference*.

”

LKPP Tahun 2019 merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

# BPK Minta Kemnaker Tindak Lanjuti Temuan Pemeriksaan



Temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti dapat disampaikan kepada BPK untuk ditetapkan sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di kantor pusat Kemnaker di Jakarta pada Kamis (12/3). Pada kesempatan itu, ada beberapa pesan yang disampaikan Anggota III BPK Achsanul Qosasi terkait LHP.

Kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan jajarannya, Achsanul menjelaskan mengenai temuan BPK yang tidak dapat ditindaklanjuti. Menurutnya, temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti dapat disampaikan kepada BPK untuk ditetapkan sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Ditambahkan, jika temuan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh kementerian/ lembaga yang bersangkutan, maka BPK tidak dapat mencegah aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjutinya.

"Kalau ada temuan-temuan BPK yang tidak bisa ditindaklanjuti, menurut Bapak/Ibu tidak mungkin lagi ditindaklanjuti, hal ini segera disampaikan kepada pimpinan agar dibahas dan bersurat kepada BPK untuk dimasukkan ke dalam (temuan) yang tidak dapat ditindaklanjuti," ungkap Achsanul.

Anggota III BPK sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III mengatakan, temuan

yang tidak dapat ditindaklanjuti tersebut sama kelasnya dengan temuan yang sudah ditindaklanjuti.

Sementara LHP yang diserahkan yaitu LHP Kepatuhan atas Belanja Barang dan Belanja Modal pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) Kemnaker.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tersebut bertujuan untuk memberikan simpulan, apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban atas belanja barang dan belanja modal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan ini mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang Modal Tahun 2018 dan 2019 (s/d triwulan III).

Lokasi pemeriksaan meliputi kantor pusat di Jakarta dan lokasi uji petik di Jawa Barat dan Jawa Timur. Termasuk juga Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) pada Direktorat Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Dit PPTKLN) Ditjen Binapenta dan PKK Perwakilan RI di Jeddah (Arab Saudi) dan Abu Dhabi (Uni Emirat Arab).

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa hasil uji petik atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan belanja modal pada Ditjen Binalattas dan Ditjen Binapenta dan PKK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ■



# Tahukah Anda Penerapan Manajemen Risiko di BPK?

(Tata Cara Pengisian Form Sesuai Pedoman Manajemen Risiko – Seri 2)



■ DITULIS OLEH: **DEDY**  
DIREVIU OLEH: **IDA SUNDARI**  
DIVALIDASI OLEH: **SLAMET KURNIAWAN**

Manajemen Risiko harus disusun dengan penuh perencanaan untuk menghasilkan *output* yang sesuai keinginan ataupun tujuan organisasi.

Pada edisi Warta BPK sebelumnya, telah dijelaskan tata cara pengisian tiga (3) Form yaitu :

1. Formulir I Konteks Manajemen Risiko
2. Manual Indikator Risiko Utama
3. Formulir II. Peta dan Profil Risiko

Tentunya, sebagai suatu sistem yang handal, Manajemen Risiko harus disusun dengan penuh perencanaan untuk menghasilkan *output* yang sesuai keinginan ataupun tujuan organisasi. Untuk Edisi saat ini, akan dibahas dua (2) formulir, yaitu: Formulir III. Penanganan Risiko dan Formulir Rencana Kontigensi. Formulir III. Penanganan Risiko, secara garis besar berisi tujuan rencana aksi atas penanganan Risiko. Sedangkan Formulir Rencana Kontigensi merupakan rencana atau langkah-langkah penanganan pada saat risiko berubah menjadi masalah atau disebut juga simulasi apabila masalah terjadi.

## 1. Formulir III. Penanganan Risiko

Berikut akan dijelaskan tata cara pengisian atas masing-masing kolom di Formulir III ini.

### a. Prioritas Risiko

Kolom ini di isi sesuai dengan kolom Evaluasi Risiko – Bagian Prioritas Risiko di Formulir II.

### b. Risiko

Kolom ini di isi sesuai dengan Kolom Kejadian Risiko di Formulir II.

### c. Risiko Sebelum Penanganan

Kolom ini terdiri dari 3, yaitu Level Kejadian (LK), Level

Dampak (LD) dan Level Risiko (LR). Untuk pengisiannya merupakan pindahan dari Formulir II, disesuaikan dengan Kejadian Risikonya.

### d. Opsi Penanganan Risiko

Pengisian untuk kolom ini bisa memilih salah satu ataupun 2 pilihan sekaligus yaitu

- Mengurangi Kemungkinan
- Menurunkan Dampak

### e. Rencana Aksi Penanganan Risiko

Kolom ini di isi dengan Rencana penanganan untuk kejadian risiko yang dimaksud.

### f. Pelaksanaan

Kolom ini di isi dengan langkah atau tata cara yang lebih detail dalam melaksanakan rencana aksi penanganan risiko.

### g. Output

Merupakan hasil keluaran dari pelaksanaan tersebut.

Apakah berupa dokumen, notulensi, laporan, kertas kerja, dan lainnya.

### h. Target Kinerja

Merupakan jumlah keluaran yang menjadi tujuan atau target pencapaian dari kolom Output. Bisa berupa 1 dokumen, atau 2 dokumen dst.

### i. Jadwal Implementasi

Di isi dengan jadwal atas rencana pelaksanaan. Jangka waktu diserahkan kepada pemilik risiko. Dengan jangka waktu dari 1 hari sampai dengan 12 bulan.

### j. Penanggung jawab

Merupakan bagian yang dikuasakan oleh pemilik risiko un-

tuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi.  
**k. Risiko Residual yang diharapkan Setelah penanganan**  
 Kolom ini terdiri dari 3, yaitu Level Kejadian (LK), Level Dampak (LD) dan Level Risiko (LR). Untuk pengisiannya meru-

pakan tingkat level yang diharapkan sesudah dilakukan penanganan atau mitigasi risiko. Tentunya angka yang dihasilkan diharapkan lebih rendah dari kolom Risiko Sebelum Penanganan apabila dilakukan penanganan risiko.

LAMPIRAN III.7 : KEPUTUSAN BPK – RI  
 NOMOR : 7/K/1-XIII.2/9/2018  
 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2018

**Formulir Penanganan Risiko**

REVISI : 0

**Formulir III - Penanganan Risiko**

SKPR : (Unit Kerja Eselon I atau Eselon II atau Eselon III SKPR)  
 Periode Penerapan : (Tahun Penerapan Manajemen Risiko)


Prioritas Risiko	No	Risiko	Risiko sebelum penanganan			Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Output	Target kinerja	Jadwal implementasi	Penanggung jawab	Risiko residual yang diharapkan setelah penanganan		
			LK	LD	LR							LK	LD	LR

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Eselon IV	Eselon III	Eselon II
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:

WAKIL KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
**BAHRULLAH AKBAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
 Pemeriksaan Keuangan Negara,

  
 Nizam Durhanuddin

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
**MOERMAHAD SOERJA DJANEGARA**

**Contoh Pengisian Formulir III di Inspektorat Utama Tahun 2018**

SKPR : Inspektorat Utama  
 Periode Penangan : 2018

Prioritas Risiko	No	Risiko	Risiko sebelum penanganan			Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Output	Target kinerja	Jadwal implementasi	Penanggung jawab	Risiko residual yang diharapkan setelah penanganan			
			LK	LD	LR							LK	LD	LR	
4	11	Terjadinya pelanggaran disiplin	1	5	20	Mengurangi pelanggaran; Meningkatkan disiplin	(1) Sosialisasi terkait budaya TP bertitik sentranya atas pelanggaran disiplin; (2) Meningkatkan penegakan disiplin secara konsisten.	1. Surat Edaran Internal (SE) 2. Notulen Sosialisasi terkait pelanggaran disiplin dan Daftar Hadir Peserta sosialisasi (SH)	1. Satu Surat Edaran 2. Satu Notulen dan daftar hadir	Minggu III Desember 2018	(1) PI (2) Internal	2	3	11	
						Menurunkan dampak	Melakukan Kampanye terkait pemeliharaan reputasi instansi	Notulen kampanye pemeliharaan reputasi instansi dan Daftar Hadir Peserta (SH)	Satu Notulen dan Daftar hadir	Minggu I Desember 2018					

LK: Level kejadian; LD: Level dampak; LR: Level risiko

Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:
Manajer Risiko Inspektorat Utama	Kepala SKPR Inspektorat Utama
Dr. Miriana Ginting M Si Tanggal: 28 November 2018	Dr. Ida Soudan M M Tanggal: 28 November 2018



## 2. Formulir Rencana Kontigensi

Seperti dijelaskan sebelumnya, fungsi penyusunan Formulir Rencana Kontigensi adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah, pada saat risiko telah berubah menjadi masalah. Formulir ini penting, agar para unit kerja yang terdampak pada munculnya masalah ini, bisa mengetahui secara jelas langkah penanganan masalah, sebagai berikut:

- a. Langkah-langkah yang harus diambil
- b. Mengetahui dengan jelas pembagian tugas serta penanggung jawab
- c. Meminimalisir kepanikan dan efisiensi pada saat pengambilan keputusan

Untuk memudahkan tatacara pengisian, maka penulis menyarankan bahwa uraian kegiatan cukup di deskripsikan dalam satu tabel yang berisi uraian kegiatan tanggap darurat, uraian pemulihan keadaan organisasi dalam keadaan tanggap darurat, dan Uraian kegiatan pemulihan keadaan organisasi ke tingkat normal.

Tentunya penanganan risiko yang telah menjadi masalah menjadi sangat komprehensif dalam meningkatkan penerapan Manajemen Risiko, apabila semua Risiko yang dianggap signifikan bisa dilakukan penyusunan formulir rencana kontigensi untuk masing-masing risiko tersebut. Untuk Penyusunan Formulir ini, tentu saja akan sangat baik, apabila semua unit kerja baik eselon I maupun Eselon II menyiapkannya. Akan tetapi, dengan alasan efektivitas, maka bisa saja cukup unit eselon I yang menyusun untuk sebagai acuan bagi semua eselon II di bawah kepeimpinannya.

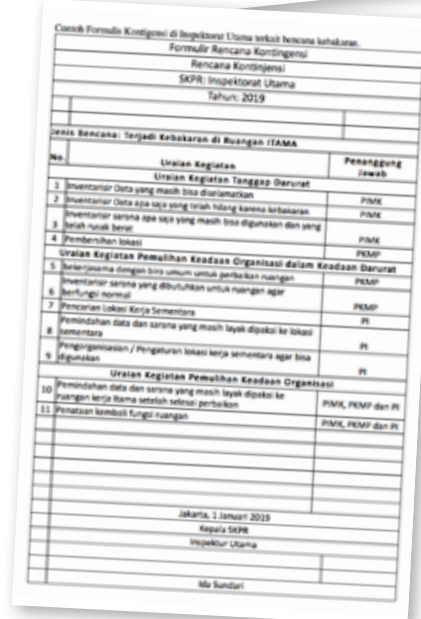
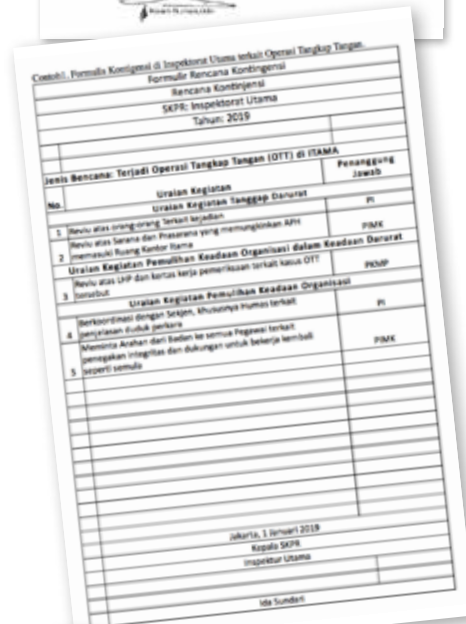
Berikut adalah tatacara Pengisian Formulir Rencana Kontigensi:

- a. SKPR**  
Diisi dengan Unit Kerja tersebut. Contoh: Inspektorat Utama.
- b. Tahun**  
Diisi dengan tahun penerapan MR. Contoh: 2019.
- c. Jenis Bencana**  
Dituliskan bencana atau masalah yang terjadi. Contoh: Kebakaran atau Pelanggaran Etik.
- d. Uraian Kegiatan**  
Di kolom ini, dijabarkan secara lengkap dan detail, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh unit kerja apabila Bencana atau Masalah tersebut muncul.
- e. Penanggung Jawab**  
Merupakan unit kerja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan memantau pelaksanaan langkah-langkah yang telah diuraikan tersebut.

Demikian tatacara pengisian formulir Manajemen Risiko seri kedua ini. Penulis mengharapkan bahwa dengan adanya Seri dua ini, maka tahap perencanaan atas manajemen risiko benar-benar dilakukan secara matang dan seksama, sehingga pada saat mitigasi risiko maupun mitigasi masalah, pihak-pihak yang terkait mengetahui secara jelas langkah yang harus diambil. ●

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email [wartabpkri@gmail.com](mailto:wartabpkri@gmail.com) dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.





27 Februari 2020

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menghadiri High Level Visit antara BPK RI, BNPT, dan PBB (UNOCT dan UNCTED) di kantor BNPT Jakarta.



26 Februari 2020

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna menghadiri acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI, bertempat di Jakarta Convention Center (26/2).

4 Maret 2020

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna menjadi narasumber di acara Rakor Kemendag.



6 Maret 2020

Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Kalimantan Barat dihadiri Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis.



12 Maret 2020

Audiensi Ketua BPK, Agung Firman Sampurna dengan Rektor UI, di Gedung BPK RI.





## 2 Maret 2020

Anggota III BPK, Achsanul Qosasi menjadi pembicara di Universitas Udayana Bali. Pada kuliah umum "Pengelolaan Keuangan Negara yg Transparan & Akuntabel di Lingkungan PTN", Achsanul Qosasi mengajak civitas akademika, pejabat dan staf Universitas Udayana agar memahami UU keuangan negara, UU perbendaharaan negara & UU pendidikan tinggi.

## 17 Maret 2020

Silaturahmi Ketua BPK, Agung Firman Sampurna dengan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.



## 4 Maret 2020

*Courtesy Call* Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono dengan Duta Besar Guinea-Bissau, Carlos Antonio Moren di Gedung BPK RI.

## 13 Maret 2020

Senam bersama Biro Humas dan Biro Umum BPK RI.



## 5 Maret 2020

Goes to Campus UIN Lampung dihadiri oleh Tortama V Novian Herodwijanti dan Tortama VII Akhsanul Khaq sebagai narasumber.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

*Semakin mudah  
mengakses informasi melalui*



**BPK RI Official**



**www.bpk.go.id**



**@bpkri**



**@bpkriofficial**



**Tugas BPK**

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.